

**DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI  
KEHUTANAN DAN TATA  
LINGKUNGAN**

# **RENCANA KERJA** **(perubahan)**

# **2023**



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN

-  [www.pkti.menlhk.go.id](http://www.pkti.menlhk.go.id)
-  [Direktorat Jenderal Pkti](#)
-  [@ditjenpkti.klhk](#)
-  [Planhutaling KLHK](#)



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN  
DAN TATA LINGKUNGAN**

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA  
LINGKUNGAN**

NOMOR: SK.34/SET.2/PEHKT/KEU.0/12/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI  
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN NOMOR SK.21/PKTL/SET.2/KEU.0/  
12/2022 TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI  
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK.21/PKTL/SET.2/KEU.0/12/2022 telah ditetapkan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023.
- b. Bahwa pada tahun 2023 berjalan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah mengalami beberapa penyesuaian rencana kerja dan anggaran.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK.21/PKTL/SET.2/KEU.0/12/2022 telah ditetapkan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang ...



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
13. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK-SETJEN/ROKUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;

16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
17. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 253);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 80);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan;
21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1173/MENLHK/SETJEN/REN.0/11/2022 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2023

KESATU : Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan rencana kerja yang telah mengalami penyesuaian target dan anggaran, mengacu pada perkembangan perubahan target prioritas nasional serta isu dan permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan, diantaranya percepatan penyelesaian kegiatan prioritas melalui Tambahan Anggaran Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan serta pencadangan dan realokasi anggaran (*Automatic Adjustment*) Belanja Kementerian LHK tahun 2023.

KEDUA ...

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI  
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ  
NIP. 19710321 199302 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Program, Evaluasi,  
Hukum dan Kerjasama Teknik,



IRIYONO SAPUTRO  
NIP. 19660619 199103 1 001

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Nomor : SK.34/SET.2/PEHKT/KEU.0/12/2023

Tanggal : 15 Desember 2023

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI  
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN NOMOR  
SK.21/PKTL/SET.2/KEU.0/12/2022 TENTANG RENCANA KERJA  
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA  
LINGKUNGAN TAHUN 2023**



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	I
DAFTAR TABEL .....	II
DAFTAR GAMBAR .....	III
DAFTAR LAMPIRAN.....	IV
KATA PENGANTAR .....	V
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	2
C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA.....	4
D. PENGARUSUTAMAAN .....	11
BAB II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DAN TAHUN 2022.....	12
A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2021 DAN TAHUN 2022.....	12
B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN PROGRAM TAHUN 2021 DAN TAHUN 2022.....	40
BAB III. RENCANA KERJA TAHUN 2023 .....	42
A. STRATEGI DALAM MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023.....	42
B. PROGRAM, SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2023 .....	45
3) KERANGKA PENDANAAN BELANJA TAHUN 2023 .....	62
4) PENGUATAN BELANJA TAHUN 2023 ( <i>BUDGET TAGGING</i> ).....	63
BAB IV. PENUTUP .....	65
LAMPIRAN .....	66

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sebaran Nomenklatur, Lokasi dan Wilayah Kerja BPKHTL.....	8
Tabel 2 Kegiatan Pengembangan SDM Lingkup Ditjen PKTL (s.d November 2023) .....	10
Tabel 3 Capaian Kinerja Ditjen PKTL Tahun 2021 .....	14
Tabel 4 Capaian Kinerja Ditjen PKTL Tahun 2022.....	17
Tabel 5 Target dan Realisasi Penerimaan PNBP-PKH tahun 2009 s.d. tahun 2022 .....	26
Tabel 6 Lokasi Kegiatan Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi secara Partisipatif terkait dengan Air.....	33
Tabel 7 Serapan Anggaran Ditjen PKTL tahun 2021 .....	40
Tabel 8 Serapan Anggaran Ditjen PKTL tahun 2022 .....	41
Tabel 9 Dukungan Ditjen PKTL tahun 2023 dalam Prioritas Nasional.....	43
Tabel 10 Distribusi Pagu belanja tambahan sumber dana PNBP-PKH Tahun 2023.....	49
Tabel 11 Tambahan Target dan Anggaran TA 2023 Pasca ABT PNBP PKH.....	50
Tabel 12 Penyesuaian Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Program Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2023 .....	55
Tabel 13 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan tahun 2023.....	58
Tabel 14 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen tahun 2023 .....	61



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Sebaran SDM Lingkup Ditjen PKTL (orang) sd November 2023 .....	9
Gambar 2 Dukungan Ditjen PKTL dalam Pengarusutamaan ( <i>mainstreaming</i> ).....	11
Gambar 3 Capaian Kinerja Ditjen PKTL tahun 2021 .....	15
Gambar 4 Capaian Kinerja Ditjen PKTL tahun 2022 .....	18
Gambar 5 Perkembangan Penetapan Kawasan Hutan sd 2022 .....	19
Gambar 6 Distribusi dan Jumlah Plot PSP yang dianalisis .....	21
Gambar 7 Hasil Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia tahun 2021 .....	22
Gambar 8 Diagram Deforestasi Netto Indonesia 2020 – 2021 pada Hutan Primer, .....	22
Gambar 9 Revisi Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber TORA.....	27
Gambar 10 Perkembangan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup Amdalnet.....	37
Gambar 11 Capaian Nilai SAKIP Ditjen PKTL.....	38
Gambar 12 Perubahan Anggaran tahun 2021.....	40
Gambar 13 Perubahan Anggaran tahun 2022.....	41
Gambar 14 Tema dan Sasaran Pembangunan RKP 2023 (Perpres 108 Tahun 2022) .....	42
Gambar 15 Penyesuaian Sasaran dan Indikator Kinerja Ditjen PKTL tahun 2023 .....	53
Gambar 16 Perubahan Pagu Alokasi Anggaran Ditjen PKTL Tahun 2023 .....	62

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Matrik Rencana dan Kegiatan Tahun 2023 Ditjen PKTL (Renja Awal) .....	67
Lampiran 2 Dukungan/Modalitas Kegiatan Tahun 2023 Lingkup Ditjen PKTL .....	81
Lampiran 3 Matriks Semula Menjadi Informasi Kinerja Renja Ditjen PKTL TA 2023 Pasca Pemantapan Renja KLHK Tahun 2023 Program KLH .....	86
Lampiran 4 Penyesuaian Matriks Renja Ditjen PKTL Tahun 2023.....	91
Lampiran 5 Penyesuaian Target Penataan Batas Kawasan Hutan (Reguler) Tahun 2023.....	99
Lampiran 6 Penyesuaian Target Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan.....	100
Lampiran 7 Penyesuaian Target Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan SDH di wilayah BPKHTL.....	101
Lampiran 8 Penyesuaian Target Kegiatan Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan di wilayah UPT BPKHTL .....	102
Lampiran 9 Rincian Lokus Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Dampak Lingkungan di wilayah UPT BPKHTL.....	103

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke-4 (keempat) dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 sekaligus penjabaran dari Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yang memuat garis besar (gambaran) target kinerja dan anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selama satu tahun pada seluruh satker lingkup baik pusat maupun daerah.

Sebagaimana tema pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) tahun 2023 yakni "Produktivitas tapak hutan dan lingkungan hidup untuk transformasi ekonomi Indonesia ", Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berupaya menyelesaikan kegiatan prioritas-prioritas utama tahun 2023 diantaranya percepatan penyelesaian tata batas kawasan hutan dalam rangka penetapan Kawasan hutan 100%, pelaksanaan major project pembangunan Ibukota Negara (IKN), penyiapan safeguard lingkungan hidup serta target prioritas nasional lainnya.

Seiring dengan berjalannya tahun 2023 dan sesuai dengan dinamika pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran pada tahun 2023, telah terjadi penyesuaian target dan anggaran kegiatan prioritas, yang berasal dari anggaran belanja tambahan penggunaan kawasan hutan serta pencadangan anggaran (Automatic Adjustment) Belanja Kementerian LHK tahun 2023.

Dalam rangka menjaga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2023, perlu dilakukan penyesuaian Rencana Kerja tahun 2023 yang nantinya akan menjadi acuan penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tahun 2023.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja (Perubahan) ini bermanfaat untuk mengawal pencapaian sasaran seperti yang diharapkan.

Direktur Jenderal,

-ttt-

Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut, M.P  
NIP. 19710321 199302 1 001

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Pencapaian target Renstra Revisi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2020-2024 telah dilakukan pada 3 (tiga) tahun terakhir dengan berbagai langkah strategis dalam rangka pencapaian arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, didalam masa pandemi Covid-19 yang telah melanda bangsa Indonesia yang tentunya sangat berdampak dalam perekonomian Indonesia.

Pada tahun 2020 dan 2021, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah melakukan berbagai strategi dalam memberikan dukungan terhadap penanggulangan Pandemi Covid-19 (*Refocusing*), penyiapan lahan pangan terpadu *Food Estate* dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), serta penguatan kegiatan Perencanaan; Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan; Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan; Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan; Penataan dan Pencegahan dampak Lingkungan; Sarana dan Prasarana Pemantapan Kawasan Hutan; dan Kegiatan pendukung pemantapan kawasan hutan lainnya melalui penggunaan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan. Terkait dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tetap berupaya melakukan inovasi-inovasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan agar sasaran program dan indikator kinerja program yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal.

Pada tahun 2022 dan 2023, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan terus berupaya bangkit dan beradaptasi menghadapi dampak pandemi tersebut melalui Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Tema pembangunan ini diarahkan untuk pemulihan dampak Covid-19 dengan berorientasi pada membangun ke depan dengan lebih baik (*Build Forward Better*). Dengan dukungan anggaran yang ada, beberapa langkah yang dilakukan diantaranya percepatan penyelesaian penataan batas kawasan hutan (reguler) dalam rangka penetapan kawasan hutan 100% sebagaimana yang telah dimandatkan dalam Undang-undang Cipta Kerja, percepatan penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk Ibukota Negara (IKN), Penyelesaian PPTKH dan pelepasan KH untuk TORA, percepatan penyelesaian penyusunan rencana kawasan hutan dalam rangka Impementasi *Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* di tingkat tapak, penguatan Penerimaan PNBP-PKH, penguatan Data dan Informasi sumber daya hutan, percepatan penyusunan instrument lingkungan, pengembangan Amdalnet dan percepatan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya hutan.

Sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 yakni "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", serta tema pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) tahun 2023 dengan narasi ringkas "Produktivitas tapak hutan dan lingkungan hidup untuk transformasi ekonomi Indonesia",



Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berupaya mengoptimalkan dan mempercepat penyelesaian kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas, memperhatikan *mainstream* rencana pembangunan tahun 2023 tersebut dan prioritas nasional yang telah ditetapkan.

Dalam pencapaian tujuan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023 tersebut, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan juga berperan aktif dalam 4 (empat) pilar.



## B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta dipimpin oleh Direktur Jenderal.

## PERMENLHK NOMOR 15 TAHUN 2021

### TUGAS :

#### (Pasal 79)

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan

### FUNGSI :

#### (Pasal 80)

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan
4. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan
7. Pelaksanaan tugas administrasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

### C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, bahwa susunan organisasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan terdiri atas 6 (enam) Unit Kerja Eselon II, dengan penjabaran tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Unit Kerja Eselon II.

#### **DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN** (Pasal 81, PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021)



**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**  
(Pasal 82 – 83, PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021)



**Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan**  
(Pasal 91 – 92, PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021)



**Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan**  
(Pasal 99 – 100, PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021)

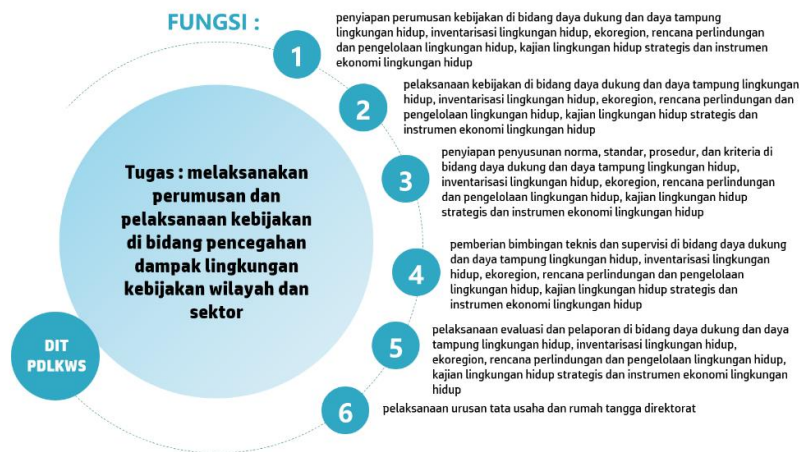




**Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan**  
(Pasal 107 – 108, PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021)



**Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor**  
(Pasal 115 – 116, PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021)



**Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan**  
(Pasal 123 – 124, PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021)



Bahwa untuk mendukung peningkatan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi serta organisasi dan tata kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan, melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, dimana Balai Pemantapan Kawasan Hutan tata Lingkungan (BPKHTL) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal serta dipimpin oleh Kepala Balai.

## PERMENLHK NOMOR 18 TAHUN 2022

TUGAS :	FUNGSI :
<p><b><i>Pasal 3, ayat (1)</i></b></p> <p>Melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan</p>	<p><b><i>Pasal 3, ayat (2)</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas, dan pemetaan kawasan hutan;</li> <li>2. pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan;</li> <li>3. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian penggunaan kawasan hutan;</li> <li>4. penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu;</li> <li>5. pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah;</li> <li>6. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;</li> <li>7. penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan;</li> <li>8. penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan;</li> <li>9. pelaksanaan verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;</li> <li>10. fasilitasi penyiapan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;</li> <li>11. pelaksanaan pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah;</li> <li>12. pelaksanaan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;</li> <li>13. pelaksanaan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrument ekonomi lingkungan hidup di daerah; dan</li> <li>14. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.</li> </ol>

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan yang selanjutnya disingkat BPKHTL adalah UPT yang menyelenggarakan pemantapan kawasan hutan dan tata lingkungan, terdiri atas 22 (dua puluh dua) balai.

Tabel 1 Sebaran Nomenklatur, Lokasi dan Wilayah Kerja BPKHTL

No	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1	BPKHTL Wilayah I	Medan	(1) Provinsi Sumatera Utara dan (2) Provinsi Sumatera Barat.
2	BPKHTL Wilayah II	Palembang	Provinsi Sumatera Selatan.
3	BPKHTL Wilayah III	Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat.
4	BPKHTL Wilayah IV	Samarinda	(1) Provinsi Kalimantan Timur, dan (2) Provinsi Kalimantan Utara.
5	BPKHTL Wilayah V	Banjarbaru	Provinsi Kalimantan Selatan.
6	BPKHTL Wilayah VI	Manado	(1) Provinsi Sulawesi Utara dan (2) Provinsi Maluku Utara.
7	BPKHTL Wilayah VII	Makassar	(1) Provinsi Sulawesi Selatan dan (2) Provinsi Sulawesi Barat.
8	BPKHTL Wilayah VIII	Denpasar	(1) Provinsi Bali dan (2) Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9	BPKHTL Wilayah IX	Ambon	Provinsi Maluku.
10	BPKHTL Wilayah X	Jayapura	(1) Provinsi Papua, (2) Provinsi Papua Tengah, (3) Provinsi Papua Pegunungan, dan (4) Provinsi Papua Selatan.
11	BPKHTL Wilayah XI	Yogyakarta	(1) Provinsi Jawa Barat, (2) Provinsi Jawa Tengah, (3) Provinsi Jawa Timur, (4) Provinsi DI Yogyakarta, (5) Provinsi DKI Jakarta dan (6) Provinsi Banten.
12	BPKHTL Wilayah XII	Tanjung pinang	Provinsi Kepulauan Riau.
13	BPKHTL Wilayah XIII	Pangkal Pinang	(1) Provinsi Bangka Belitung dan (2) Provinsi Jambi.
14	BPKHTL Wilayah XIV	Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur.
15	BPKHTL Wilayah XV	Gorontalo	Provinsi Gorontalo.
16	BPKHTL Wilayah XVI	Palu	Provinsi Sulawesi Tengah.
17	BPKHTL Wilayah XVII	Manokwari	Provinsi Papua Barat.
18	BPKHTL Wilayah XVIII	Banda Aceh	Provinsi Aceh.
19	BPKHTL Wilayah XIX	Pekanbaru	Provinsi Riau.
20	BPKHTL Wilayah XX	Bandar Lampung	(1) Provinsi Lampung dan (2) Provinsi Bengkulu.
21	BPKHTL Wilayah XXI	Palangkaraya	Provinsi Kalimantan Tengah.
22	BPKHTL Wilayah XXII	Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara.

(sesuai Permenlhk Nomor 18 tahun 2022)

## SUMBER DAYA MANUSIA

Pencapaian target pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan khususnya pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentu saja tidak lepas dari sumber daya manusia yang dimiliki baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pada tahun 2023, dengan target kinerja yang cukup besar, diantaranya penyelesaian tata batas kawasan hutan dalam rangka penetapan kawasan hutan 100%, Optimalisasi penerimaan PNBP-PKH serta peningkatan kualitas lingkungan hidup, maka perlu didukung sumber daya manusia sebagai pemikir, perencana maupun penggerak.

**JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA DITJEN PKTL  
BAIK PUSAT MAUPUN DAERAH SEJUMLAH 1.809 ORANG**



**PNS : 1.256 ORANG**

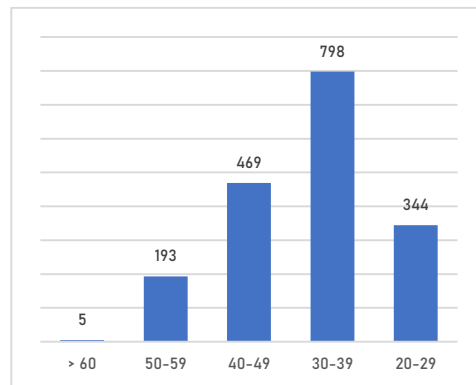
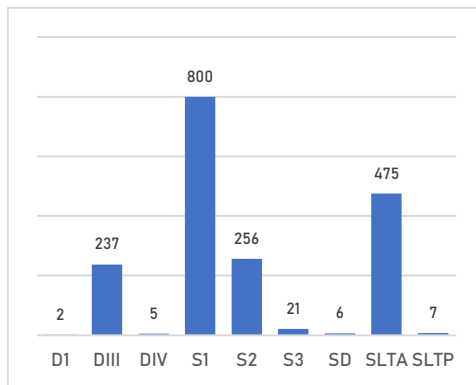
**PPPK : 70 ORANG**

**PPNPN : 483 ORANG**

**LAKI LAKI  
SEJUMLAH 1.173  
ORANG**  
(64,8% dari jumlah SDM)

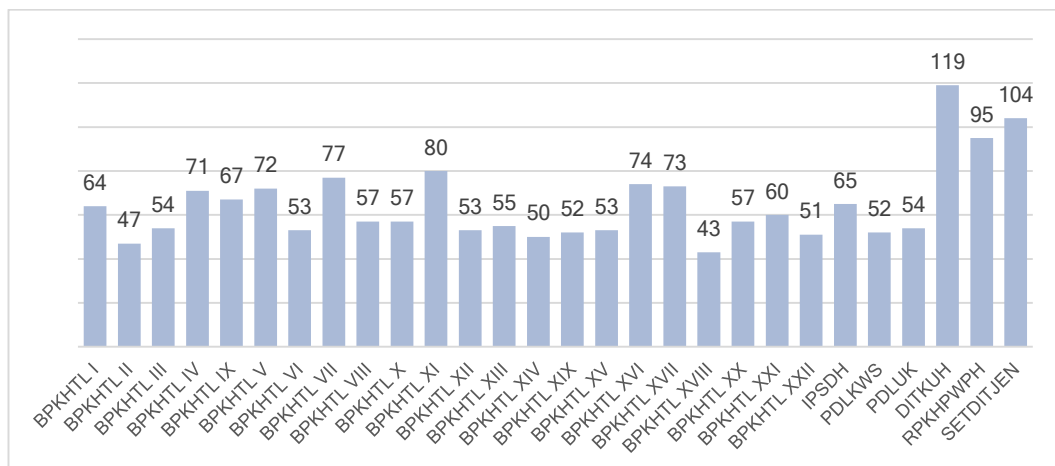


**PEREMPUAN  
SEJUMLAH 636  
ORANG**  
(35,2% dari jumlah SDM)



(BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN)

(BERDASARKAN TINGKAT USIA)



**Gambar 1 Sebaran SDM Lingkup Ditjen PKTL (orang) sd November 2023**

Semakin meningkatnya target kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan khususnya Balai pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan dalam rangka penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penataan lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan, perlu dilakukan



pelatihan dalam rangka penguatan pengetahuan/kemampuan/keterampilan di bidang tata lingkungan dan kehutanan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai IPTEK yang berwawasan lingkungan hidup dan kehutanan lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, hingga November tahun 2023 telah dilakukan berbagai pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi serta pembinaan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; pengembangan standarisasi dan sertifikasi kompetensi; serta peningkatan pendidikan melalui tugas belajar maupun izin belajar.

**Tabel 2 Kegiatan Pengembangan SDM Lingkup Ditjen PKTL Mulai 2021 s.d 2023**

Uraian Kegiatan	PESERTA		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Pelatihan/bimtek Kearsipan	87	137	224
Pelatihan AMDAL	312	274	632
Pelatihan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	40	40	80
Pelatihan Penataan Batas Wilayah	146	39	185
Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	25	14	39
Bimtek Jabatan Fungsional	1.250	1.063	2.313
Bimtek Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup Tinggi	52	28	80
Training Multimedia Content Creator	39	21	60
Pelatihan Online Jurnalistik Terpadu	47	33	80
Bimtek/sosialisasi Penilaian Kinerja	66	73	139
Diklat Perancang Peraturan Perundangan Tingkat Dasar	6	10	16
Bimbingan Teknis Analisa Dampak Lingkungan	122	74	196
Pelatihan Advokasi Hukum	4	1	5
Pelatihan Budaya Pelayanan Prima	13	37	50
Microlearning bidang IT	46	41	87
Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan	7	23	30
Pelatihan Sistem Informasi Geografis	66	26	112
Pelatihan Gada Pratama (Satpam)	36	-	36
Pelatihan Wirausaha/ Enterpreneur Training	32	18	50
Bimtek Penyusunan Renstra/Renja Lingkup Ditjen PKTL	19	21	40
<b>JUMLAH</b>	<b>2.415</b>	<b>1.973</b>	<b>4.454</b>

## D. PENGARUSUTAMAAN

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) telah ditetapkan sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Pengarusutamaan tentunya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain itu, dengan pengarusutamaan akan mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, dan pada akhirnya bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Di dalam Revisi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2020-2024 terdapat 6 (enam) pengarusutamaan yang saling terkait dan saling mendukung.



Gambar 2 Dukungan Ditjen PKTL dalam Pengarusutamaan (*mainstreaming*)

## BAB II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DAN TAHUN 2022

### A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2021 DAN TAHUN 2022

Tahun 2021 menjadi tahun untuk Indonesia beradaptasi dan menangani pandemi Covid-19 yang menyebabkan terjadinya berbagai perubahan alokasi anggaran Kementerian/Lembaga. Namun demikian dengan tantangan yang dihadapi saat ini, tidak saja penanganan pandemi dengan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), namun juga transformasi ekonomi dalam jangka menengah dan panjang yang harus dilakukan. Dalam hal ini, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tetap berupaya melakukan inovasi-inovasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal.

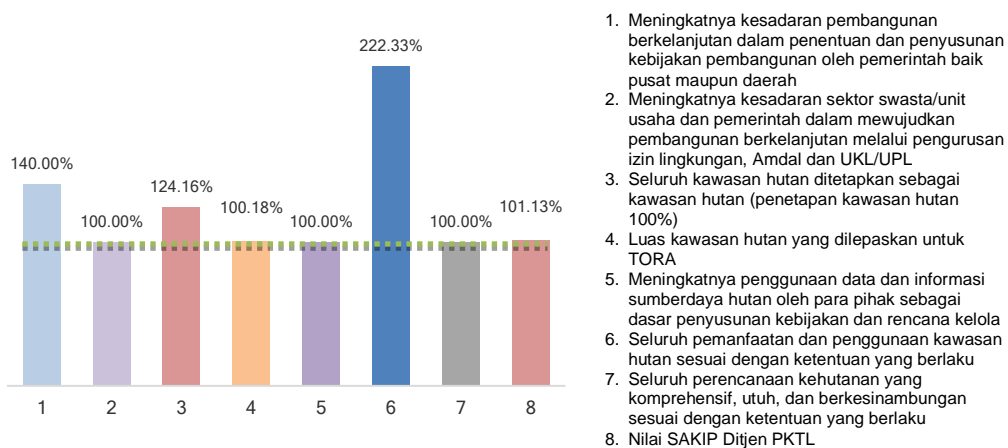
Pada tahun 2021 berjalan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah melakukan beberapa perubahan anggaran DIPA tahun 2021 yang tentunya mempengaruhi target dan anggaran yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahun 2021, yakni:

<b>a. Refocusing dan realokasi belanja tahap I</b>	Revisi ini merupakan penghematan anggaran terhadap DIPA tahun 2021 dalam rangka penanggulangan Covid-19. Revisi dilakukan dengan menyesuaikan pagu belanja K/L yang dilakukan pada anggaran yang berasal dari rupiah murni dalam satu program dan pencairan blokir/tanda bintang. Dalam revisi ini terjadi pengurangan volume RO kegiatan non-prioritas nasional. Perubahan besar terdapat pada pengurangan anggaran pada kegiatan penataan batas kawasan hutan (regular) dan inventarisasi hutan nasional.
<b>b. Penambahan Pagu Anggaran Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan</b>	Revisi ini dilakukan dalam rangka penambahan pagu anggaran DIPA yang bersumber dari PNBP-PKH dan penambahan volume RO Prioritas Nasional didalam satu Program. Penambahan anggaran yang bersumber dari PNBP-PKH sebagian besar digunakan untuk kegiatan pengukuhan kawasan hutan khususnya kegiatan percepatan penetapan kawasan hutan (10.221 km) dan penyelesaian TORA (tata batas tora 3.792 km / inver tora seluas 20,190 Ha), pemulihan kegiatan Inventarisasi SDH, optimalisasi penerimaan PNBP-PKH (202 WB), pengembangan <i>Enterprise Architecture</i> (EA) Integrasi Sistem Informasi lingkup Ditjen PKTL serta dukungan terhadap pencegahan dampak lingkungan.
<b>c. Penyesuaian RO-KRO DIPA untuk Penandaan Rincian Output PC PEN Kementerian LHK</b>	Sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-5/AG/2021 pasal 8 bahwa disepakati adanya pemisahan antara alokasi anggaran PEN dan alokasi anggaran non-PEN dengan membuat Rincian Output PEN yang baru, maka dilakukan penyesuaian anggaran kegiatan dengan adanya penambahan Rincian Output baru untuk menampung

<b>TA. 2021</b>	penandaan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Jenis pergeseran anggaran yang dilakukan oleh Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam rangka pergeseran anggaran antara RO Reguler ke RO khusus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) antara lain pergeseran anggaran dalam rangka ketahanan pangan dan pergeseran anggaran dalam rangka padat karya.
<b>d. Refocusing dan realokasi belanja tahap II</b>	Revisi ini merupakan penghematan Belanja Pegawai Tahun 2021, serta penyesuaian anggaran dan lokasi kegiatan <i>Food Estate</i> Tahun 2021. Penghematan belanja pegawai dilakukan dengan pengurangan pagu anggaran belanja pegawai (tunjangan kinerja THR dan Gaji-13) yang bersumber dari Rupiah Murni. Penyesuaian anggaran dan lokasi kegiatan <i>Food Estate</i> Tahun 2021 dilakukan dengan penyesuaian lokus prioritas kegiatan <i>Food Estate</i> Tahun 2021, Revisi Pengalokasian anggaran <i>Refund Ineligible Expenditure</i> HLN TA 2019
<b>e. Refocusing dan realokasi belanja tahap III</b>	Pada tahap ini, <i>refocusing</i> dan realokasi belanja dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal diantaranya sumber dana <i>refocusing</i> berasal dari Rupiah Murni dengan jenis belanja yang data dipergunakan adalah belanja barang dan belanja modal (belanja Non operasional). Adapun perubahan yang terjadi pada DIPA Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yakni pengurangan anggaran kegiatan PEN, pergeseran anggaran antar Rincian Output dalam satu Program.
<b>f. Refocusing dan realokasi belanja tahap IV</b>	Revisi ini merupakan revisi dalam rangka penghematan pagu belanja yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dalam rangka penanganan covid diantaranya penghematan Belanja Pegawai Tahun 2021, pengurangan pagu anggaran yang bersumber dari RM pada berbagai kegiatan serta pergeseran anggaran antar program dari sumber dana PNBK.
<b>g. Penyesuaian anggaran kegiatan dalam 1 (satu) program dalam rangka percepatan penyelesaian pengukuhan kawasan hutan</b>	Revisi ini merupakan revisi pergeseran anggaran belanja antar satker pada kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan dalam rangka percepatan penyelesaian pengukuhan kawasan hutan dalam kurun waktu paling lama 2 (dua) tahun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021. Beberapa kegiatan diantaranya pembahasan trayek batas, inventarisasi kawasan, penataan batas kawasan hutan dan penataan batas kawasan perairan.

Tabel 3 Capaian Kinerja Ditjen PKTL Tahun 2021

SASARAN / INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
<b>Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan</b>				
IKP : Meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah	KLHS	15	21	140,00%
IKP : Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan, Amdal dan UKL/UPL	Laporan	3	3	100,00%
<b>Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual</b>				
IKP : Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%)	Juta hektar	12	14,90	124,16%
<b>Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA</b>				
IKP : Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Ribu Hektar	184,4	184,731	100,18%
<b>Tersedianya Data dan Informasi SDH</b>				
IKP : Meningkatnya penggunaan data dan informasi sumberdaya hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola	Layanan	1	1	100,00%
<b>Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan</b>				
IKP : Seluruh pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pemohon	300	667	222,33%
<b>Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan</b>				
IKP : Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Layanan	12	12	100,00%
<b>Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi birokrasi</b>				
IKP : Nilai SAKIP Ditjen PKTL	poin	80	79,89	101,13%
<b>RATA-RATA</b>				<b>123,48%</b>



Gambar 3 Capaian Kinerja Ditjen PKTL tahun 2021  
 Sumber : LKJ Ditjen PKTL Tahun 2021

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah disusun arsitektur kinerja dalam rencana kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2022 berdasarkan perubahan struktur organisasi, tugas pokok maupun fungsi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Arsitektur kinerja tersebut juga telah disesuaikan dengan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP).

Pada tahun 2022 berjalan, telah dilakukan beberapa penyesuaian target kinerja yang diakibatkan oleh penyesuaian anggaran pada kegiatan prioritas, pencadangan anggaran (*Automatic Adjustment*) pada Belanja K/L TA. 2022, maupun penambahan anggaran yang berasal dari sumber dana PNBP-PKH, antara lain:

**a. Dukungan penyelesaian RPPLH Nasional**

Revisi ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya terkait penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional berupa pembahasan materi teknis lintas kementerian/lembaga, legal drafting dan finalisasi draft RPP. Percepatan penyusunan RPP ini sangat diperlukan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 serta memenuhi mandat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan mengakomodir dinamika perencanaan pembangunan nasional bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan diantaranya target *Sustainable Development Goals* (SDGs), komitmen Indonesia terkait penurunan emisi gas rumah kaca sesuai *Nationally Determined Contribution* (NDC), dan isu strategis lainnya. Pemenuhan kebutuhan anggaran dilakukan melalui pergeseran anggaran antar RO antar satker pada 1 (satu) program yang sama.



<p><b>b. Penambahan Pencadangan Anggaran (Automatic Adjustment) Belanja Ditjen PKTL TA. 2022</b></p>	<p>Guna mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global yang berdampak pada perekonomian domestik, dilakukan penambahan pencadangan anggaran (<i>Automatic Adjustment</i>) pada semua K/L. Telah ditetapkan tambahan <i>Automatic Adjustment</i> (AA) belanja pada Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, yang berasal dari Belanja Operasional dan Non Operasional.</p>
<p><b>c. Pemenuhan kebutuhan Dana Operasional Pimpinan (DOWM) melalui pergeseran anggaran belanja Program Dukman antar unit eselon I</b></p>	<p>Dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran untuk pembayaran Dana Operasional Pimpinan, Kementerian LHK mengajukan usulan pergeseran belanja dalam Program Dukungan Manajemen Teknis melalui optimalisasi anggaran internal Setjen KLHK dan melalui pergeseran anggaran antar unit eselon I lingkup Kementerian LHK.</p>
<p><b>d. Realokasi anggaran PNBP-PKH</b></p>	<p>Berdasarkan hasil pembahasan antara Kementerian Keuangan dan Kementerian LHK, telah disepakati bersama target pendapatan dan pagu penggunaan untuk masing masing jenis PNBP yang berlaku lingkup Kementerian LHK. Untuk jenis PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PKH), telah ditetapkan target pendapatan tahun 2022 sebesar Rp1,399 triliun dan pagu penggunaan PNBP-nya sebesar Rp150 miliar.</p> <p>Dari pagu penggunaan PNBP sebesar Rp150 miliar di atas, yang telah teralokasi dalam DIPA Ditjen PKTL tahun 2022 adalah sebesar Rp85,408 miliar. Terjadi misalokasi/selisih pagu penggunaan PNBP PKH sebesar Rp64,592 miliar pada unit eselon I lain di luar Ditjen PKTL sehingga untuk sementara dilakukan blokir PNBP sebesar angka di atas pada Ditjen PDASRH selaku unit eselon I pengguna PNBP terbesar. Hal tersebut mengakibatkan perlu adanya realokasi pagu PNBP PKH dari Ditjen PDASRH ke Ditjen PKTL untuk memenuhi pagu penggunaan PNBP PKH sebesar Rp150 miliar.</p> <p>Anggaran PNBP PKH tersebut dimanfaatkan tentunya untuk percepatan penetapan kawasan hutan (penambahan penetapan kawasan hutan, penyelesaian penataan batas Kawasan IKN dalam rangka penyiapan pelepasan IKN, serta penyusunan perencanaan kawasan hutan mendukung kebijakan pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan.</p>

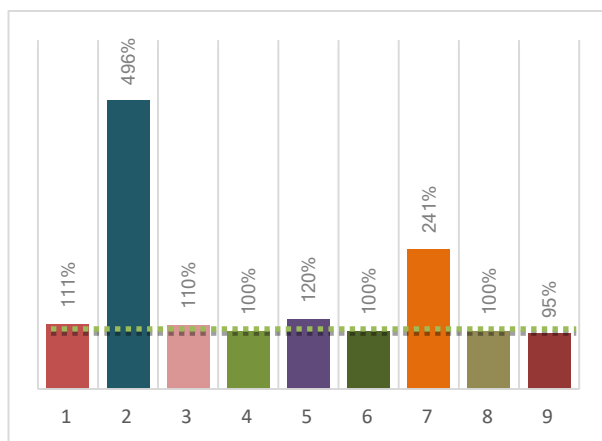
<b>e. Dukungan Pelaksanaan <i>Environments Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group</i> (EDM-CSWG)</b>	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diberi mandat sebagai penyelenggara kegiatan <i>Environments Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group</i> (EDM-CSWG), dimana pendanaan penyelenggaraan dibebankan pada APBN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
<b>f. penyesuaian anggaran yang berstatus blokir <i>Automatic Adjustment</i> (AA) Tahun 2022</b>	Dalam rangka mengantisipasi kebutuhan prioritas dan mendesak di akhir tahun 2022, seluruh anggaran yang masih terblokir ( <i>Automatic Adjustment</i> ) direalokasi ke bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

Tabel 4 Capaian Kinerja Ditjen PKTL Tahun 2022

SASARAN / INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENT ASECAPAIAN
<b>Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan</b>				
IKP : Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	Dokumen	1 (71)	1 (79)	111%
IKP : Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan, Amdal dan UKL/UPL	Laporan	1 (99)	1 (491)	496%
<b>Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual</b>				
IKP : Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%)	Juta hektar	5,9	6,5	110%
IKP : Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	Layanan	31	31	100%
<b>Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA</b>				
IKP : Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Ribu Hektar	94,756	113,669	120%
<b>Tersedianya Data dan Informasi SDH</b>				
IKP : Meningkatnya penggunaan data dan informasi SDH oleh para pihak	Layanan	1	1	100%
<b>Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan</b>				
IKP : Seluruh Penggunaan KH sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	Pemohon	300	724	241%

SASARAN / INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
<b>Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan</b>				
IKP : Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Layanan	1 (572)	1 (575)	100%
<b>Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima</b>				
IKP : Nilai SAKIP Ditjen PKTL	poin	81	76,85	95%
<b>RATA-RATA CAPAIAN</b>				<b>110%</b>

Sumber : LKJ Ditjen PKTL Tahun 2022



Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan  
Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan, Amdal dan UKL/UPL  
Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%)  
Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan  
Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA  
Meningkatnya penggunaan data dan informasi SDH oleh para pihak  
Seluruh Penggunaan KH sesuai dengan Ketentuan yang berlaku  
Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

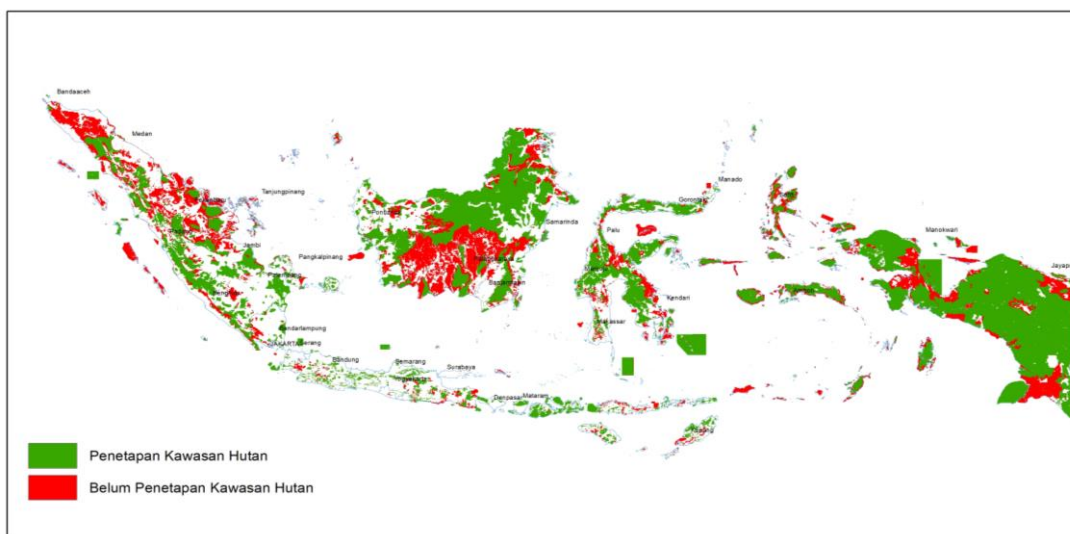
Gambar 4 Capaian Kinerja Ditjen PKTL tahun 2022

Sumber : LKJ Ditjen PKTL Tahun 2022

## IKP 1. Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%)

Kawasan hutan yang diakui secara legal dan aktual dapat diwujudkan melalui penetapan kawasan hutan. Penetapan kawasan hutan merupakan tahap akhir dari proses pengukuhan kawasan hutan agar suatu kawasan hutan mempunyai kepastian status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan. Secara kumulatif, sampai dengan November 2022, telah ditetapkan kawasan hutan sebanyak 2.199 unit kelompok hutan dengan total luas 90.845.838 ha atau 72,22% dari total luas kawasan hutan (125.795.306 ha).

S/D TAHUN	LUAS PENETAPAN AKUMULASI (HEKTAR)
2015	79.287.632
2016	85.838.601
2017	87.833.320
2018	88.145.055
2019	88.248.478
2020	88.585.951
2021	89.863.031
<b>2022</b>	<b>99.659.195,5</b>



Gambar 5 Perkembangan Penetapan Kawasan Hutan sd 2022

Target awal penetapan kawasan hutan di tahun 2021 adalah 3,5 juta hektar, namun dengan adanya penambahan anggaran penataan batas kawasan hutan, terjadi perubahan target menjadi 12 juta hektar. Penambahan target luas penetapan kawasan hutan terjadi pada pertengahan tahun anggaran disebabkan oleh adanya penambahan anggaran pelaksanaan penataan batas. Penambahan penataan batas ini tidak serta merta langsung menghasilkan luas penetapan kawasan hutan pada tahun anggaran yang sama. Secara

umum, pelaksanaan penataan batas yang dilakukan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan baru dapat diselesaikan pada akhir tahun anggaran untuk kemudian dilakukan penelaahan oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan. Penelaahan ini baru dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

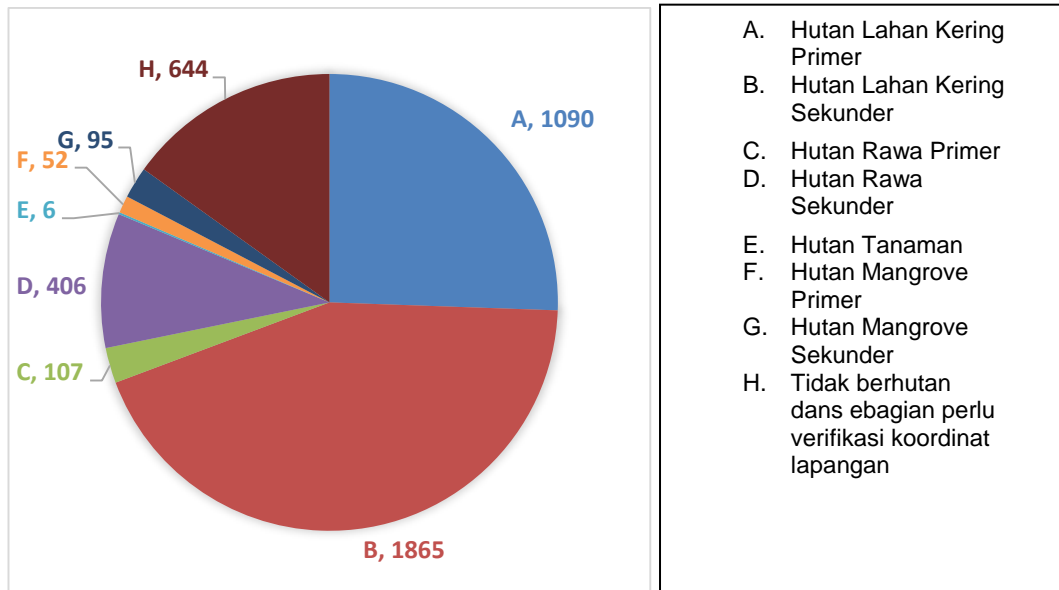
Pada tahun 2022, berdasarkan target awal penetapan kawasan hutan sebesar 2,5 juta hektar. Dengan adanya penambahan anggaran yang berdasarkan dari sumber dana PNBK-PKH, maka terdapat penambahan target menjadi 5,9 juta hektar, dengan target penyelesaian penataan batas kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan serta Sulawesi Tengah. Adapun sisa penetapan kawasan hutan ini akan diselesaikan pada tahun 2023 sebagaimana mandat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.



## **IKP 2. Meningkatnya penggunaan data dan informasi sumberdaya hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola**

Peningkatan penggunaan data dan informasi sumber daya hutan dicapai melalui kegiatan-kegiatan mencakup Penyediaan data dan informasi potensi Sumber Daya Hutan, Update Penutupan Lahan Nasional; Laporan Deforestasi; Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut; Informasi geospasial LHK yang terintegrasi dalam Jaringan Geospasial Nasional Untuk Mendukung Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) dan pelayanan penggunaan data dan informasi SDH melalui analisis spasial telaah berbagai kebijakan dan program pemerintah, kebencanaan serta telaah kepentingan negara lainnya.

Potensi sumber daya hutan nasional diperoleh dari hasil inventarisasi hutan nasional. Kegiatan inventarisasi hutan nasional dilaksanakan dengan membuat plot ukur berupa *Temporary Sample Plots/Permanent Sample Plots (TSP/PSP)* secara sistematis di seluruh wilayah kawasan hutan di Indonesia. Pencatatan data di tiap plot dilakukan oleh tim teknis BPKH sedangkan analisis data untuk penghitungan potensi sumber daya hutan dilakukan oleh Direktorat IPSDH. Potensi sumber daya hutan yang disajikan meliputi volume tegakan dan biomassa pada hutan lahan kering dan hutan rawa dalam skala regional (7 kelompok pulau besar) secara spasial dan non spasial. Data yang digunakan dalam analisis potensi sumber daya hutan Indonesia ini adalah data PSP hasil pengukuran tahun. 1990-2021. Selama periode tersebut telah dibangun 4265 klaster TSP/PSP. Pada beberapa plot telah dilakukan pengukuran ulang dan didapatkan 5742 set data pengukuran. Data yang digunakan dalam analisis adalah data plot PSP dari pengukuran yang terakhir.



**Gambar 6 Distribusi dan Jumlah Plot PSP yang dianalisis**

Kegiatan penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan merupakan memiliki hasil berupa tersedianya data perubahan luas kawasan hutan dan penyebabnya, perubahan luas penutupan hutan, perubahan potensi kayu dan perubahan nilai potensi kayu. Hasil-hasil tersebut digolongkan sesuai dengan kondisi hutan (hutan primer, hutan sekunder dan non hutan) dan tipe hutan (hutan mangrove, hutan lahan basah dan hutan lahan kering). Berdasarkan data NSDH, luas kawasan hutan pada awal tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan luas kawasan hutan pada awal tahun 2020, dari 119.053.281,71 ha menjadi 119.009.683,65 ha. Penurunan terbesar terjadi pada hutan produksi sebesar 26.128,84 ha dan satu – satunya kenaikan luasan terjadi pada hutan produksi terbatas dengan 22.750,88 ha.

Selain itu, data penutupan lahan merupakan salah satu informasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang dibutuhkan dalam kegiatan pembangunan hutan secara berkelanjutan khususnya dalam bidang perencanaan, pemantauan dan evaluasi. Penyediaan data penutupan lahan dilakukan dalam dua skala yaitu penutupan lahan skala nasional dan penutupan lahan skala unit pengelolaan (tingkat tapak). Data dan informasi penutupan lahan terkini di daratan Indonesia baik luas maupun sebarannya dikemas dalam laporan rekalkulasi penutupan lahan Indonesia.

Hingga tahun 2022, Rekalkulasi penutupan lahan Indonesia dilakukan terhadap seluruh daratan Indonesia seluas 187,7 juta ha yang terdiri dari kawasan hutan daratan seluas 118,4 juta ha (63,1 %) dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 69,3 juta ha (36,9 %). Berdasarkan hasil rekalkulasi penutupan lahan Indonesia secara keseluruhan terhadap luas daratan Indonesia pada tahun 2021, terdapat lahan berhutan seluas 95,3 juta ha (50,8 %) dan lahan tidak berhutan seluas 92,3 juta ha (49,2 %). Rekapitulasi Hasil Rekalkulasi Penutupan Lahan Tahun 2021 selengkapnya disajikan pada Tabel berikut.



NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL		
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		JUMLAH	%	
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	INDONESIA											
A.	Hutan	17.442,3	23.953,1	21.785,1	18.876,3	82.056,8	5.792,9	87.849,7	7.485,7	95.335,4	50,8	
B.	Non Hutan	4.339,1	5.310,2	5.006,6	10.317,2	24.973,2	5.542,6	30.515,8	61.828,0	92.343,7	49,2	
	<b>Total</b>	<b>21.781,4</b>	<b>29.263,4</b>	<b>26.791,7</b>	<b>29.193,5</b>	<b>107.030,0</b>	<b>11.335,5</b>	<b>118.365,5</b>	<b>69.313,7</b>	<b>187.679,1</b>	<b>100,0</b>	

Sumber : Pengolahan data, 2022

Ket. Tubuh air (danau, sungai besar, laut (kawasan konservasi perairan) tidak termasuk dalam penghitungan.

Gambar 7 Hasil Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia tahun 2021

Dari analisis perubahan penutupan lahan dapat dilakukan penghitungan deforestasi. Pengolahan data deforestasi menghasilkan informasi deforestasi netto Indonesia tahun 2020 -2021 adalah sebesar 113,5 ribu ha. Angka ini berasal dari angka deforestasi bruto sebesar 139,1 ribu ha dikurangi reforestasi sebesar 25,6 ribu ha. Luas deforestasi tertinggi terjadi di kelas hutan sekunder, yaitu 126,7 ribu ha, di mana 72,7% atau 92,1 ribu ha berada di dalam kawasan hutan dan sisanya seluas 36,6 ribu ha atau 28,9% berada di luar kawasan hutan.



Sumber: Pengolahan data, 2022

Ket. \* : Hutan Tanaman berdasarkan penafsiran citra adalah penutupan lahan hutan yang merupakan hasil budidaya manusia, meliputi seluruh Hutan Tanaman baik Hutan Tanaman Industri/IUPHHK-HT maupun Hutan Tanaman yang merupakan hasil reboisasi/penghijauan yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan; terlihat dari citra mempunyai pola tanam yang teratur pada area datar, sedangkan untuk daerah bergelombang terlihat warna citra yang berbeda dgn lingkungan sekitarnya. Deforestasi pada Hutan Tanaman di dalam kawasan hutan HK dan/atau HL, tidak diklasifikasikan sebagai Hutan Tanaman Industri/IUPHHK-HT

Gambar 8 Diagram Deforestasi Netto Indonesia 2020 – 2021 pada Hutan Primer, Hutan Sekunder, Hutan Tanaman Di Dalam dan Luar Kawasan Hutan

Dalam rangka implementasi Instruksi Presiden tersebut telah disusun Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan

Gambut yang diperbaharui setiap 6 bulan. Pada Tahun 2022 diterbitkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Periode I sesuai Keputusan Menteri LHK Nomor SK. 1629/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/3/2022 dan diperbaharui dengan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam primer dan Lahan Gambut Tahun 2022 Periode II sesuai Keputusan Menteri LHK Nomor SK. 7594/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/9/2022.

Berkenaan dengan terbitnya PP Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) sebagai salah satu entitas Eselon II Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang ditunjuk sebagai Walidata Geospasial, telah dilakukan pengembangan infrastruktur Informasi Geospasial yaitu:

- a. Penataan kebijakan dan peraturan melalui penyusunan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan penyusunan Peta Jalan Pengembangan Informasi Geospasial Lingkup KLHK Tahun 2022 - 2026.
- b. Penguatan Kelembagaan Pelaksana JIG melalui pembentukan Tim pelaksana JIG lingkup KLHK (Keputusan Sekjen KLHK Nomor SK.12/SETJEN/ROKUM/PLA.1/3/2022), pemberntuan Tim Pengelola JIG Lingkup BPKH (Keputusan Direktur IPSDH Nomor SK.13/IPSDH/JIGLHK/PLA.1/6/2022). dan forum Data Geospasial yang dikoordinasikan oleh Walidata Geospasial dalam bentuk diskusi, rapat dan grup media sosial.
- c. Penyempurnaan dan peningkatan standar data melalui pemutakhiran Kamus Data Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021 dalam rangka meningkatkan kualitas DG dan IGT lingkup KLHK, draf manajemen kualitas (form QC dan QA), draf standar rule topologi, draf simbologi peta, dan draf klasifikasi hak akses bagi pakai IGT, serta penjaminan kualitas terhadap pemutakhiran 31 IGT yang diproduksi oleh Produsen DG selama tahun 2022 sebelum IGT tersebut disebarluaskan.
- d. Peningkatan teknologi melalui pengembangan Sistem Informasi Geospasial (SIGAP) KLHK, diantaranya menu tata kelola, tampilan desain portal SIGAP, penambahan fitur analisis data geospasial berbasis web yang akan memudahkan pengguna menganalisis secara interaktif dengan menggunakan batas administrasi pemerintahan dan batas *Area of Interest* (Aoi), pencarian metadata, dan kamus data selama tahun 2021-2022, serta peningkatan infrastruktur JIG yaitu pengadaan server dan laptop. KLHK cq. Direktorat IPSDH mendapatkan penghargaan Bhumandala Award Tahun 2022 sebagai simpul jaringan terbaik tingkat K/L (Bhumandala Kanaka/Emas).

Selain itu juga telah dilakukan pengumpulan dan penyimpanan 90 IGT lingkup KLHK yang berasal dari 34 Produsen Data Geospasial, serta penyebarluasan IGT melalui pelayanan permohonan pada tahun 2021 dan 2022 sebanyak 523 Permohonan (K/L, Pemda, Perguruan Tinggi, perseorangan, masyarakat), dan melalui portal SIGAP KLHK. Dalam rangka optimalisasi pertukaran IGT, maka telah dilakukan penyusunan dan penandatanganan perjanjian keamanan data dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Timur, serta BRGM dalam rangka bagi pakai IGT melalui SIGAP KLHK. Jumlah IGT dari 3 perjanjian kerjasama dimaksud meliputi 31 IGT LHK, antara lain data penutupan lahan, KPH, KPHK dan kawasan konservasi, deforestasi dan reforestasi, IGT terkait perubahan iklim, seperti kebakaran hutan dan lahan, WPK, lokasi Proklamasi, kerusakan lahan, serta terkait gambut dan perhutanan sosial, dan lainnya. Proses persiapan kerjasama keamanan data dalam rangka pertukaran IGT KLHK ini didukung oleh anggaran yang berasal dari luar DIPA dengan tetap mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.

Pasca terbitnya Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta yang telah disempurnakan dengan Perpres No. 23 Tahun 2021, Direktorat IPSDH selaku Walidata Geospasial dan koordinator pelaksanaan kebijakan satu peta lingkup KLHK, telah memfasilitasi kegiatan kompilasi dan integrasi sebanyak 25 IGT sesuai renaksi percepatan pelaksanaan KSP ke portal KSP yang berkoordinasi dengan Kemenko bidang Perekonomian dan BIG. Pasca terbitnya PP 43 / 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah, Dit IPSDH juga memfasilitasi penyusunan PITT yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator bidang perekonomian, yaitu:

1. Kepmenko Perekonomian Nomor 164 Tahun 2021 tentang Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Ketidaksesuaian Perizinan Pertambangan dalam Kawasan Hutan;
2. Kepmenko Perekonomian Nomor 222-255 Tahun 2021 tentang Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang Kawasan Hutan;
3. Kepmenko Perekonomian Nomor 133 Tahun 2022 tentang Peta Indikatif Tumpang Tindih Informasi Geospasial Tematik Hak Guna Usaha dan Tutupan Kelapa Sawit Dalam Kawasan Hutan;
4. Kepmenko Perekonomian Nomor 134 Tahun 2022 tentang Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Ketidaksesuaian Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Selain itu dalam rangka pemenuhan renaksi STRANAS PK peran Direktorat IPSDH adalah melakukan kompilasi dan integrasi IGT dalam One Map untuk mendukung proses telaahan di direktorat teknis terkait. Capaian dalam rangka stranas PK adalah diterbitkannya penetapan Peta Indikatif Tumpang Tindih Informasi Geospasial Bidang LHK dengan RTRWP/K dan tematiknya lainnya sebagai informasi awal penyelesaian permasalahan di lapangan sesuai mekanisme peraturan perundangan yang berlaku tanpa menghilangkan sanksi administrasi dan pidananya.

### **IKP 3. Seluruh pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku**

Penggunaan kawasan hutan merupakan kegiatan pembangunan yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk pembangunan non kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan proses perizinan dapat terlayani secara maksimal dengan adanya perbaikan sistem dalam pelayanan dan revisi peraturan terkait penggunaan kawasan hutan. Selain itu, kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan di dalam kawasan hutan dapat terakomodir khususnya untuk mendukung ketahanan pangan, energi dan air dengan tetap menjamin keberlanjutan fungsi hutan.

Kegiatan utama pengendalian penggunaan kawasan hutan adalah penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan di bidang penelaahan dan teknis penggunaan kawasan hutan, serta verifikasi kewajiban pemegang izin penggunaan kawasan hutan (PNBP). Pengendalian penggunaan kawasan hutan melalui mekanisme izin pinjam pakai terdiri dari:

- Izin pinjam pakai kawasan hutan (Eksplorasi/Operasi Produksi Pertambangan, dan Non Pertambangan), termasuk perubahan dan perpanjangan
- Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan Survei
- Penetapan areal kerja Ijin Pinjam Pakai
- Serah Terima Lahan Kompensasi
- Persetujuan Kerjasama penggunaan kawasan hutan
- Penolakan penggunaan kawasan hutan bagi permohonan yang tidak memenuhi ketentuan teknis
- Pengakhiran IPPKH.

Pada Tahun 2022 kegiatan penelaahan dan pemantauan Penggunaan Kawasan Hutan sebanyak 541 unit yang terdiri dari permohonan Operasi Produksi, Eksplorasi Lanjutan, Persetujuan Survey, Persetujuan Kerjasama, dan Lahan Kompensasi dan Perpanjangan Penyelesaian Komitmen Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan. Pelayanan Penggunaan Kawasan Hutan pada tahun 2022 sebanyak 724 Unit dimana sebanyak 183 unit diantaranya merupakan permohonan tahun 2021. Data selengkapnya dapat ditampilkan pada tabel di bawah ini.

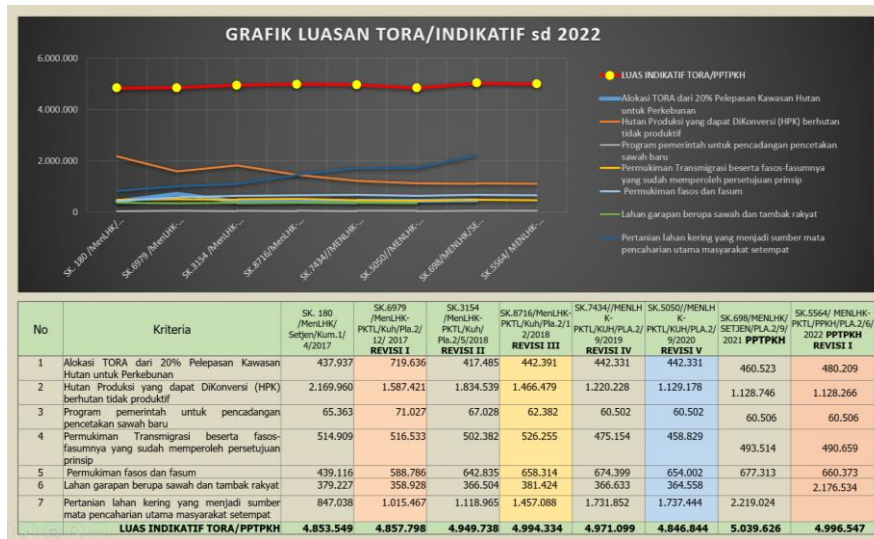
Pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) merupakan salah satu bentuk pengendalian penggunaan kawasan hutan. Informasi penerimaan PNBP dapat diperoleh dari Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) yang melayani Pembayaran PNBP PKH. Hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan percepatan monitoring pelaksanaan kegiatan melalui Sistem Laporan Penggunaan Kawasan Hutan Online.

Tabel 5 Target dan Realisasi Penerimaan PNBP-PKH tahun 2009 s.d. tahun 2022

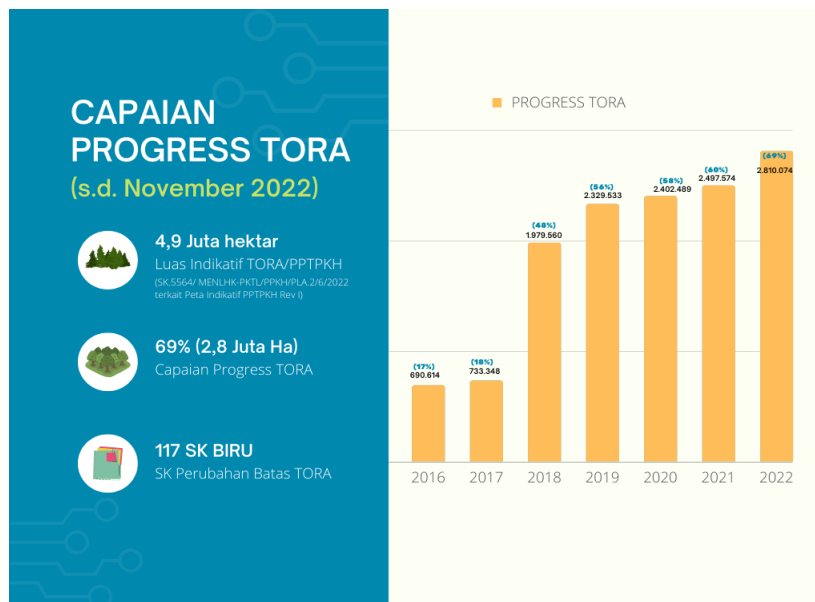
NO	TAHUN	Jumlah WB	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2009	130	196.013.110.000	169.797.334.864	86,63%
2	2010	182	100.000.000.000	175.859.245.949	175,86%
3	2011	251	175.018.696.000	432.550.625.157	247,15%
4	2012	339	227.293.588.000	472.956.976.846	208,08%
5	2013	449	495.168.490.000	587.960.710.378	118,74%
6	2014	548	640.322.000.000	882.598.385.150	137,84%
7	2015	593	849.588.380.000	1.070.087.169.829	125,95%
8	2016	641	1.000.307.416.075	1.183.084.469.880	118,27%
9	2017	785	1.164.846.575.540	1.413.168.383.981	121,32%
10	2018	844	1.181.072.838.280	1.535.241.339.864	129,99%
11	2019	913	1.164.514.574.450	2.121.568.893.935	182,18%
12	2020	581	1.474.200.000.800	1.926.011.409.769	130,65%
13	2021	578	1.445.000.000.000	2.474.382.466.657	171,24%
14	2022	724	1.770.700.460.000	2.934.657.003.639	166,73%

#### **IKP 4. Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA**

Penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang berasal dari kawasan hutan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan sekaligus memberi kepastian hak atas tanah bagi masyarakat serta menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan. Sumber-sumber TORA tergambar dalam Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA, dan dilakukan revisi setiap 6 (enam) bulan sekali berdasarkan (1) data dan informasi penutupan lahan terkini; (2) hasil inventarisasi dan verifikasi lapangan; dan (3) masukan dari para pihak.



Gambar 9 Revisi Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber TORA



Hingga November 2022, progress pencapaian TORA telah mencapai 2,8 juta Hektar atau 69% dari target capaian TORA hingga tahun 2024, dengan menghasilkan jumlah SK Perubahan Batas TORA sebanyak 117 SK Biru. Penerbitan SK pelepasan kawasan hutan ini merupakan tahap akhir dari proses penyediaan kawasan hutan sebagai sumber TORA baik dengan mekanisme inver, maupun non-inver. Permasalahan yang dihadapi antara lain: 1) sedikitnya permohonan pelepasan HPK tidak produktif yang sudah dicadangkan; 2) Terdapat Kab/Kota yang tidak mengusulkan/terlambat mengajukan permohonan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH); 3) Terdapat pemukiman fasos fasum yang tidak terakomodir dalam permohonan PPTKH dari kab/kota dan tidak masuk dalam rekomendasi Gubernur; 4) Keterbatasan anggaran APBN untuk kegiatan inver maupun tata batas; 5) Lahan garapan masyarakat tidak terakomodir karena terletak di luar peta indikatif TORA.





## **IKP 5. Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku**

Perencanaan Kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Secara umum, rencana kehutanan terdiri dari Rencana Kawasan Hutan dan Rencana Pembangunan Kehutanan. Dalam proses mewujudkan perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada tahun 2021 dan 2022 berjalan telah dilakukan beberapa pencapaian output, diantaranya:

a. Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP;

Perkembangan luas kawasan hutan sangat dinamis. Hal ini disebabkan antara lain karena perubahan fungsi kawasan hutan, pelepasan kawasan hutan, tukar menukar kawasan hutan, kegiatan penataan batas kawasan hutan dan perubahan RTRW Provinsi. Perkembangan kawasan ini secara langsung mengakibatkan perubahan terhadap wilayah pengelolaan KPHL dan KPHP. Sehingga perlu dilakukan rasionalisasi wilayah KPH secara berkala terhadap perkembangan kawasan hutan. Rasionalisasi setidaknya dapat berpengaruh terhadap luas KPH secara keseluruhan dan jenis atau dominasi fungsi kawasan hutan di KPH itu sendiri. Selain itu, perubahan wilayah KPH dimungkinkan melalui usulan pemerintah daerah. Pada Tahun 2021 telah dilakukan penyusunan/update peta penetapan dan kelembagaan KPH di provinsi Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Bengkulu, Sumatera Barat, dan Maluku Utara, sedangkan 3 (tiga) provinsi sampai dengan akhir tahun 2021 masih berproses dalam penetapan SK Menteri LHK. Update peta wilayah KPH Indonesia tetap dilakukan dan telah diupload ke jaringan data spasial kehutanan.

Tahun 2022 capaian realisasi sebesar 533 peta terupdate. Kegiatan Penyusunan/Update peta penetapan dan kelembagaan KPH di tahun 2022 dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan penyusunan revisi atas penetapan KPH provinsi dan pemantauan proses revisi RPHJP, melalui tahapan evaluasi dan monitoring atas usulan revisi penetapan wilayah KPH, pengumpulan data, pembahasan penyusunan revisi, komunikasi intensif dengan dinas, hingga update peta wilayah KPH.

b. Telaahan Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan yang Telah Mengakomodir RKTN;

Rencana Pembangunan Kehutanan adalah rencana kehutanan dalam jangka waktu dan skala geografis tertentu, yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan wilayah dengan memperhatikan arahan spasial rencana kawasan hutan dan dalam penyusunannya mengikuti siklus perencanaan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Kehutanan terdiri dari Rencana Strategis Kementerian, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra

SKPD) Provinsi, Rencana Strategis Kesatuan Pengelolaan Hutan (Renstra KPH), Rencana Kerja Kementerian, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Provinsi, dan Rencana Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (Renja KPH).

Sebagai bagian integral dari pola ruang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kawasan hutan memiliki keunikan dalam pengaturan aktivitas yang diperkenankan di atasnya. Untuk mewujudkan kesamaan ruang antara peta kawasan hutan dengan peta pola ruang RTRWP, perlu dilakukan pengendalian penataan ruang, yang menghasilkan peta hasil integrasi KPH dalam RTRWP dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan dalam kegiatan fasilitasi penataan ruang kawasan hutan pada saat dilakukan review RTRWP.

Untuk menjawab dinamika multisektoral diperlukan suatu kajian yang komprehensif dan salah satu yang utama adalah adanya mekanisme pengintegrasian (analisis kesesuaian) Rencana Tata Ruang dengan Kawasan Hutan, berupa Pengendalian penataan ruang kawasan hutan, Data dan informasi Rencana Tata Ruang termutakhir, dan Peta integrasi (analisis kesesuaian) Rencana Tata Ruang dengan Kawasan Hutan.

Kegiatan fasilitasi penataan ruang kawasan hutan dalam rangka review RTRWP dimaksudkan untuk memfasilitasi kegiatan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam review RTRWP dalam upaya menyiapkan alokasi ruang kawasan hutan berdasarkan penelitian terpadu. Pada tahun 2021, Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan dalam rangka Review RTRWP ini telah disusun pada 3 provinsi, yaitu RTRWP Provinsi Bengkulu, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.

Sebagai upaya mewujudkan keselarasan antara Rencana Kehutanan pusat dan daerah, pada tahun 2021 telah dilaksanakan kegiatan Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan yang meliputi 5 sub kegiatan; yaitu:

1. Pengintegrasian Rencana Pengelolaan KPH dengan RKTP dan RKTN, yang dilaksanakan pada 8 (delapan) propinsi yaitu: Banten, Kepulauan Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Maluku, Kepulauan Bangka Belitung dan Jawa Tengah;
2. Fasilitasi Penyusunan/Review RKTP, yang dilaksanakan terhadap 11 provinsi, yaitu Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Aceh, Sulawesi Tenggara, Papua, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Bali, Sulawesi Tengah dan Sumatera Selatan;
3. Pemantauan Rencana Kehutanan Pusat, berupa Kegiatan Pemantauan Rencana Kehutanan Pusat dilakukan dengan cara memantau keselarasan antara kebijakan dan strategi pada Rencana Kehutanan tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030 Revisi I;
4. Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi, dilanjutkan dengan melakukan pemantauan secara *desk analysis* pada 4 (empat) provinsi yang telah memiliki RKTP dan sudah disahkan melalui Perda provinsi, namun belum dipantau secara *desk analysis* pada tahun 2020 yaitu provinsi Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Sumatera Barat;

5. Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Tingkat Tapak, dilakukan pada 7 provinsi terpilih yaitu: Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur dan Banten.

Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan Dalam Rangka Review RTRWP di tahun 2022 sebanyak 2 dokumen (Usulan RTRW Provinsi Bengkulu dan Provinsi Kalimantan Selatan) dari target 2 dokumen (Usulan RTRW Provinsi). Realisasi Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan dalam rangka Review RTRWP dapat terpenuhi dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi kegiatan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam review RTRWP dalam upaya menyiapkan alokasi ruang kawasan hutan berdasarkan penelitian terpadu.

c. Data Areal Perhutanan Sosial

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimandatkan untuk melakukan identifikasi pemanfaatan kawasan hutan yang akan dengan memberikan hak akses kepada masyarakat untuk mengelola hutan melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan hutan rakyat serta kemitraan seluas 12,7 juta hektar. Sebagaimana yang telah diamanahkan dalam RPJMN 2020-2024, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah melakukan identifikasi terhadap pemanfaatan hutan dalam hal ini telah menetapkan Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial seluas ± 14 juta hektar sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.8878/MENLHK/PKTL/ REN/PLA.0/12/2021 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi VII).

Sejalan dengan tujuan dari reforma agraria, pemberian hak akses masyarakat perhutanan sosial yang berasal dari kawasan hutan tersebut diarahkan dalam rangka untuk memberi kepastian hukum atas akses kelola dan pemanfaatan oleh masyarakat di dalam kawasan hutan dan menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan. Selain itu, sebagai upaya penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan. Pemberian hak akses masyarakat dengan perhutanan sosial dengan tahap awal pada tahun 2016 yaitu menetapkannya Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial sebagaimana disebut di atas tersebar di seluruh Indonesia kecuali Pulau Jawa, yang terdiri dari areal perhutanan sosial yang berada di hutan produksi dan hutan lindung, perhutanan sosial yang berada di lahan gambut dan potensi areal perhutanan sosial yang berada di wilayah 20 persen izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman. Kenyataannya saat ini, konsentrasi kemiskinan di Jawa membuat penduduk pulau terpadat Indonesia ini sudah mendesak mendapatkan lahan. Tetapi, konsep reforma agraria mustahil diimplementasikan di Jawa mengingat luas kawasan hutan tidak lagi memungkinkan untuk dikonversi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL). Karena kawasan hutan Pulau Jawa kurang dari 30 persen, berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka hutan di Jawa tidak bisa dilepas. Perbaikan kebijakan pengelolaan kawasan hutan di Jawa tersebut telah diatur

dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan pasal 125 ayat (7), yang menyatakan bahwa kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi yang tidak dilimpahkan penyelenggaraan pengelolaannya kepada Badan Usaha Milik Negara Bidang Kehutanan ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Adapun peruntukannya yaitu untuk kepentingan Perhutanan Sosial, Penataan Kawasan Hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan (Konflik tenurial, konflik misal pemukiman, pertanian, perkebunan, pertambangan, lahan pengganti, hutan cadangan, hutan pangan, proses TMKH), penggunaan kawasan hutan (IPPKH, PPKH, Lahan kompensasi), Rehabilitasi hutan (RHL, Lahan kritis), Perlindungan hutan (kriteria lindung), pemanfaatan jasa lingkungan (kerjasama) yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Proses identifikasi lapangan yang semakin baik akan mampu menjamin perlindungan ekologis hutan di Pulau Jawa secara terukur dan terintegrasi. Pelibatan sebanyak mungkin masyarakat desa di sekitar hutan diharapkan mampu mengakselerasi fungsi pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Pasca penetapan SK 287 Tahun 2022, tentang Penetapan KHDPK, Pemerintah mempersiapkan penyusunan Peraturan Menteri LHK dalam mengakomodir dinamika dan fakta di lapangan dalam bentuk pedoman untuk KHDPK secara umum termasuk di dalamnya Perhutanan Sosial. Dengan Perhutanan Sosial ini diharapkan menjadi Solusi untuk mengakomodasi peluang Masyarakat secara legal untuk mengelola kawasan hutan secara Lestari dan ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

### **IKP : Meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah**

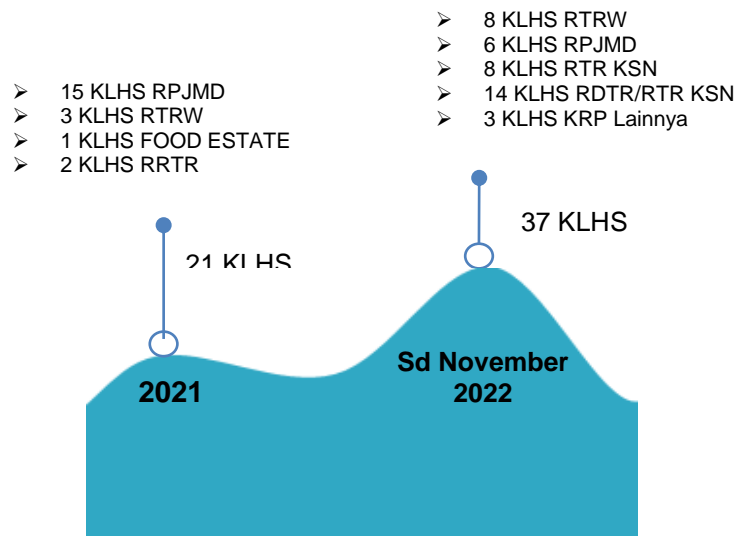
Pencegahan dampak lingkungan dilakukan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan. Upaya pencegahan dampak lingkungan dapat digolongkan menjadi dua bidang, yaitu pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan. Dalam upaya pengamanan lingkungan hidup, disusun beberapa instrumen perencanaan dan pencegahan dampak lingkungan. RPPLH, DDDTLH dan Informasi Ekoregion merupakan instrumen perencanaan yang disusun dalam rangka perlindungan lingkungan hidup. Sementara KLHS dan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup merupakan instrumen pengendalian dampak lingkungan yang disusun dalam rangka pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (UU Nomor 32 Tahun 2009).

Sesuai Amanah UU Nomor 32 Tahun 2009, pemerintah pusat dan daerah diwajibkan untuk menyusun RPPLH baik di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat perencanaan pembangunan dan spasial. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam rangka pencapaian keluaran dokumen RPPLH antara lain melakukan penyusunan/penyempurnaan materi teknis RPPLH Nasional dan Rancangan Draft Peraturan Pemerintah serta Pertemuan terkait konsultasi publik dan fasilitasi

penyusunan RPPLH Daerah. Hingga Oktober 2022, naskah urgensi penyusunan RPPLH Nasional telah selesai disusun, materi teknis RPPLH Nasional sedang dalam proses pembahasan dengan mitra terkait baik lingkup KLHK, Bappenas, Akademisi, Praktisi Lingkungan dan BRIN.

Untuk memberikan informasi dasar terkait dengan isu nasional yaitu kedaulatan pangan, kemandirian, dan ketahanan pangan, daya dukung dan daya tampung lahan prima perlu disusun dan ditetapkan melalui kegiatan verifikasi lapangan, penyusunan skor dan bobot, updating dan analisis data, penyusunan informasi DDDTLH, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan DDDTLH. Selain itu, penyusunan/update informasi ekoregion yang merupakan basis data dalam penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta cadangan sumber daya alam masih tetap dilakukan dalam skala 1:250.000.

Dalam rangka peningkatan efektifitas KLHS, telah dilakukan kegiatan pelayanan validasi KLHS untuk memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan, penjaminan kualitas serta pendokumentasian KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan. Pada tahun 2021, telah dilakukan pelayanan validasi KLHS pada 21 KLHS, antara lain 15 KLHS RPJMD, 3 KLHS RTRW, 1 KLHS Food Estate KHKP Provinsi Kalimantan Tengah, dan 2 KLHS RRTR (Masterplan IKN dan KSP Gugus Kepulauan Togean). Hingga November 2022, telah dikeluarkan persetujuan validasi untuk 37 KLHS yang meliputi 8 KLHS RTRW Provinsi, 6 KLHS RPJMD Provinsi, 8 KLHS RTR KSN, 14 KLHS RDTR/RTR KSN, dan 3 KLHS KRP Lainnya.



Salah satu kegiatan yang prioritas dilakukan diantaranya monitoring dan evaluasi KLHS Pengembangan Lahan Pangan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan untuk pemutakhiran data dan informasi terkait dengan isu-isu strategis serta pengembangan *Conceptual Framework Monev* KLHS Food Estate Kalimantan Tengah terkait dengan perubahan isu strategis pembangunan berkelanjutan; perubahan KRP FE Kalimantan Tengah; Analisis Pengaruh KRP FE Kalimantan Tengah terhadap Kondisi LH; dan *environmental dan social safeguard Food Estate*.

Dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah, pada tahun 2021 dilakukan penyusunan *Policy Brief Forest City* Ibu Kota Negara (IKN). Kegiatan ini merupakan alur proses yang berkesinambungan dari tahun 2019 telah dilakukan penyusunan KLHS IKN dan di tahun 2020 telah dilakukan Pemetaan Ekoregion skala 1:50.000 di wilayah calon IKN, hingga di tahun 2021, dilakukan penyusunan *Policy Brief* IKN, yang menghasilkan suatu gambaran prinsip dan kriteria *Forest City* dalam perwujudan lingkungan, social budaya, ekonomi dan tata kelola.

Kegiatan Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air, yang dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan data dan informasi geospasial kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi pada tahun 2021 dan 2022 berjalan sesuai dengan target dimana telah dilaksanakan kegiatan Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi secara Partisipatif terkait dengan Air pada 7 Provinsi pada tahun 2021 dan 7 Provinsi pada tahun 2022. Kegiatan verifikasi lapangan jasa lingkungan hidup tinggi terkait dengan air yang dilakukan untuk melakukan koreksi atas hasil *desk study* dari peta Indikatif yang dihasilkan. Dengan makin banyaknya titik verifikasi lapangan yang tervalidasi maka akurasi dari Peta Indikatif Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait Air semakin baik. Hal ini memberikan informasi bahwa kondisi lapangan sesuai dengan peta yang dihasilkan, diantaranya data dan informasi berdasarkan Hasil Pengukuran pH tanah dan Jenis Batuan Pada Koordinat Utama, Tekstur Tanah, Kondisi Bentang Alam, Aspek Topografi, Aspek Morfogenesis, Ketinggian serta Kemiringan Tempat.

Tabel 6 Lokasi Kegiatan Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi secara Partisipatif terkait dengan Air

NO	LOKASI KEGIATAN	TARGET 2020-2024	REALISASI	
			2021	2022
1	SUMATERA UTARA	√	√	
2	SUMATERA BARAT	√	√	
3	SUMATERA SELATAN	√	√	
4	KALIMANTAN BARAT	√		
5	KALIMANTAN TIMUR	√		
6	KALIMANTAN UTARA	√		
7	KALIMANTAN SELATAN	√		
8	SULAWESI UTARA	√		√
9	MALUKU UTARA	√		√
10	SULAWESI SELATAN	√		√
11	SULAWESI BARAT	√		√
12	BALI	√		
13	NUSA TENGGARA BARAT	√		
14	MALUKU	√		√
15	PAPUA	√	√	
16	JAWA BARAT	√		
17	JAWA TENGAH	√		
18	JAWA TIMUR	√		
19	DI YOGYAKARTA	√		
20	DKI JAKARTA	√		
21	BANTEN	√		
22	KEPULAUAN RIAU	√		



NO	LOKASI KEGIATAN	TARGET 2020-2024	REALISASI	
			2021	2022
23	BANGKA BELITUNG	√		
24	JAMBI	√		
25	NUSA TENGGARA TIMUR	√		
26	GORONTALO	√		√
27	SULAWESI TENGAH	√		
28	PAPUA BARAT	√		
29	ACEH	√	√	
30	RIAU	√		
31	LAMPUNG	√	√	
32	BENGKULU	√		
33	KALIMANTAN TENGAH	√	√	
34	SULAWESI TENGGARA	√		√
<b>TOTAL</b>		<b>34</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.3/PKTL/SET.2/OTL.0/1/2021 tentang Pelaksanaan Fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Bidang Tata Lingkungan, bahwa Balai Pemantapan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi bidang tata lingkungan diantaranya memfasilitasi Penerapan Instrument Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH) di daerah seperti sistem pembayaran jasa lingkungan hidup; Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) dan arahan tindak lanjutnya; Bimbingan teknis terkait ekoregion, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Strategis (KLHS) dan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH). untuk menjalankan fungsi tersebut, terdapat kegiatan baru yang akan dilaksanakan oleh setiap Balai Pemantapan Kawasan Hutan, yakni melalui Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKH.

Selain itu, forum bimbingan teknis juga dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tata lingkungan di daerah dan memperkuat instrumen tata lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui penyelenggaraan RPPLH dan KLHS dengan mengintegrasikan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pada tahun 2022, diseminasi Layanan Kajian Tata Lingkungan dilaksanakan pada seluruh wilayah kerja BPKHTL Wilayah I sampai XXII.

### **IKP: Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan, Amdal dan UKL/UPL**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa setiap Usaha dan/atau kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan diwajibkan untuk memiliki dokumen persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungan yang diberikan kepada pelaku usaha atau instansi pemerintah dilakukan

melalui penyusunan Amdal dan Uji Kelayakan Amdal, atau penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan formulir UKL-UPL.

Pada tahun 2021 Pelaksanaan Penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL dilakukan dengan Daring. Pelaksanaan Penilaian secara daring dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Nomor P.5/PKTL/PDLUK/PLA.4/5/2020 Tentang Mekanisme Penilaian Dokumen Amdal Secara Daring Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Target penilaian dokumen AMDAL Tahun Anggaran 2021 yang masuk sebesar 40 dokumen, namun dalam kondisi pandemi COVID 19, target penilaian AMDAL diturunkan menjadi 30 dokumen. Jumlah target dokumen yang dinilai mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Selama Tahun 2021 telah dilakukan penilaian terhadap dokumen AMDAL sebanyak 155 dokumen (melebihi target renja). Hal yang sama dengan pencapaian target tahun 2022, dimana dengan target 45 layanan, terdapat realisasi sebesar 252 layanan.

Target permohonan pemeriksaan UKL-UPL pada awal tahun anggaran sebanyak 20 (dua puluh) formulir, namun di tengah kondisi pandemi COVID-19 dan dampak pemotongan anggaran, target pemeriksaan UKL-UPL direvisi menjadi 15 (lima belas) formulir. Penilaian dokumen mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Seiring berjalannya tahun anggaran, Jumlah permohonan pemeriksaan UKL-UPL yang masuk di Tahun 2021 sebanyak 48 formulir, sedangkan di tahun 2022 mencapai 210 formulir.

Pada tahun 2022, pelaksanaan Penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL dilakukan dengan Daring. Pelaksanaan Penilaian secara daring dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Nomor P.5/PKTL/PDLUK/PLA.4/5/2020 tentang Mekanisme Penilaian Dokumen Amdal Secara Daring Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pengenaan Audit Lingkungan Hidup terbagi menjadi dua, yaitu: audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan untuk usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan dan audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan. Pada tahun 2021 telah dilakukan evaluasi audit lingkungan hidup wajib berkala untuk kegiatan berisiko tinggi terhadap lingkungan untuk 13 kegiatan.

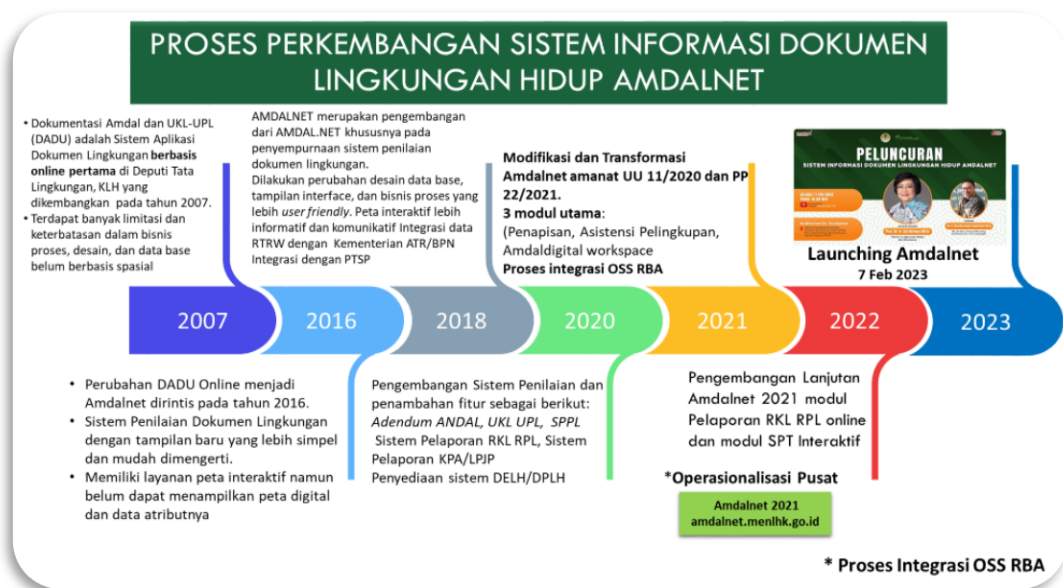
Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja terhadap KPA dan Pemeriksa UKL-UPL daerah, dimaksudkan agar Komisi Penilai Amdal (KPA) dan Instansi Lingkungan Hidup di daerah mampu memberikan Pelayanan Publik terkait Izin Lingkungan melalui proses Penilaian Amdal dan Pemeriksaan UKL-UPL serta Penerbitan Izin Lingkungan sesuai NSPK. Pemenuhan terhadap NSPK dimaksud ditunjukkan oleh Bukti Administrasi Proses dan Kualitas/Mutu Dokumen Lingkungan (output) yang menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam upaya meminimalisir/mengendalikan dampak negatif lingkungan (pencemaran dan kerusakan) pada tahap perencanaan kegiatan.

Pada tahun 2021 telah dilaksanakan kegiatan Pembinaan dan evaluasi kinerja komisi penilai Amdal daerah dan evaluasi mutu dokumen Amdal dan pemeriksaan UK UPL Kabupaten/kota yang terdiri dari:

- a. Evaluasi kinerja KPA (TUK) Daerah dan Evaluasi Mutu Dokumen Amdal pada 21 KPA (TUK) Provinsi yaitu Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Riau, Kalteng, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, DI Yogyakarta.
- b. Evaluasi kinerja KPA (TUK) Daerah dan Evaluasi Mutu Dokumen Amdal pada 21 KPA (TUK) kabupaten/kota yaitu Kab.Singaraja, Kab.Bandung Barat, Kota Semarang, Kota Cilegon, Kota Tarakan, Kota Manado, Kota Palu, Kota Gorontalo, Kota Banjarmasin, Kota Pontianak, Kab. Barru, Kota Medan, Kota Palembang, Kab. Lombok Tengah, Kota Dumai, Kab.Katingan, Kab.Timur Tengah Selatan, Kota Malang, Kabupaten Manokwari, Kota Kendari, Kota Yogyakarta.
- c. Pemeriksaan UKL-UPL pada 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Bau Bau.

Hingga tahun 2022 berjalan, Sistem informasi Amdalnet tersebut berfungsi sebagai pusat pelayanan digitalisasi dokumen lingkungan yang digunakan dalam proses penyusunan, pemrosesan, penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan sampai dengan mengeluarkan rekomendasi atau keputusan kelayakan lingkungan baik di pusat maupun daerah yang dikelola secara online/elektronik. Hal ini memudahkan pelaku usaha dan pemerintah dalam mengurangi permasalahan administratif seperti penumpukan atau tercecernya dokumen, meminimalisir kesalahan input dan penulisan pada dokumen lingkungan, pembuatan dokumen lingkungan menjadi lebih terstruktur, dan pemanfaatan Web GIS untuk melakukan analisa spasial terhadap suatu lokasi usaha dan/atau kegiatan dengan peta-peta yang terintegrasi dengan Amdal Web GIS.

Pada tahun 2022 dilakukan pengembangan lanjutan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup berupa pembangunan 2 (dua) modul berikutnya yaitu Modul Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup RKL RPL Online dan Modul Saran Pendapat Tanggapan Interaktif. Selain itu juga dilakukan pengembangan infrastruktur berupa *Sewa Cloud Server* dan *Cloud Storage Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup Amdalnet* selama 12 bulan. Dalam perkembangannya, Amdalnet akan terus mengalami penyempurnaan di berbagai fitur berdasarkan kebutuhan user dan perkembangan kebijakan/peraturan yang berlaku.



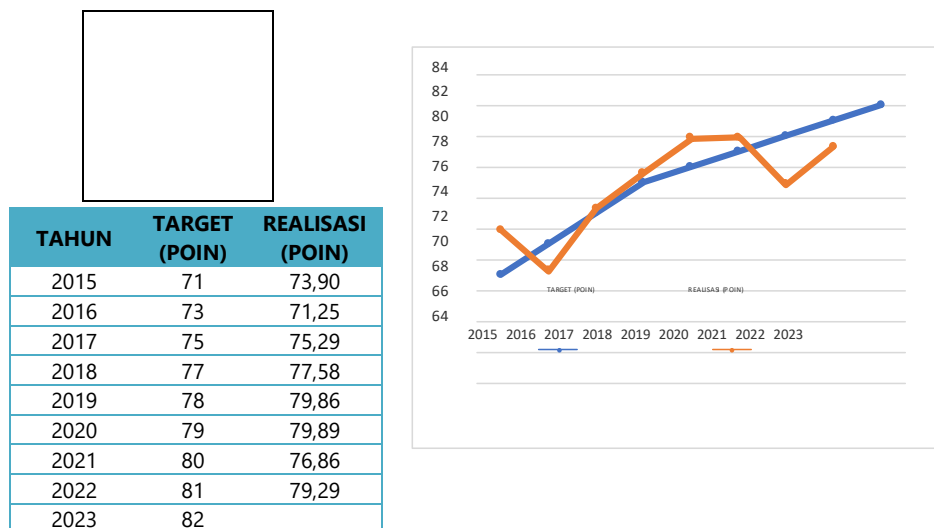
Gambar 10 Perkembangan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup Amdalnet

## IKP : Nilai SAKIP Ditjen PKTL

Sasaran Rencana Kerja (target) pada Tahun 2021 adalah Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 80 poin. Penilaian atas implementasi SAKIP tahun 2021 dilakukan pada Tahun 2022, dengan hasil nilai sebesar 76,86 dengan kategori BB (sangat baik). Kategori tersebut bermakna bahwa Ditjen PKTL telah berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Nilai ini lebih kecil dari target yang ditetapkan dan mengalami penurunan dari nilai SAKIP yang telah dicapai pada tahun 2020.

Penurunan nilai ini bukan disebabkan oleh penurunan kualitas dan kinerja Ditjen PKTL, tetapi disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan yang dipergunakan dalam melakukan evaluasi SAKIP yang semula menggunakan Peraturan Menteri PAN RB nomor 12 tahun 2015 berubah menjadi Peraturan Menteri PAN RB nomor 88 tahun 2021 dimana terdapat perubahan perubahan indikator dan satker yang dijadikan evaluatan.

Pada tahun 2022 untuk sasaran Rencana Kerja (target) ditetapkan target nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 81 poin. Penilaian atas implementasi SAKIP tahun 2022 yang akan dinilai pada triwulan II tahun 2023.



Gambar 11 Capaian Nilai SAKIP Ditjen PKTL

### Penyusunan Rencana Operasional *Forestry and Land Use (FoLU) Net Sink 2030*

Upaya Indonesia untuk mencapai Indonesia FOLU *Netsink* 2030 perlu diikuti dengan alokasi lahan yang selektif dan terkontrol untuk pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang adil dan merata bagi masyarakat Indonesia. Indonesia FOLU *Netsink* 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui penurunan emisi GRK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan dengan kondisi dimana tingkat serapan sama atau lebih tinggi dari tingkat emisi sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Hal ini sangat berbeda dengan pengertian *zero deforestation* yang merujuk pada kondisi dimana sudah tidak terjadi perubahan secara permanen lahan kategori hutan (berhutan) menjadi lahan kategori non hutan (tidak berhutan).

Pertemuan Negara Para Pihak Konvensi Perubahan Iklim di Glasgow, UK tahun 2021 (*Conference of Parties, COP 26 UNFCCC*) menghasilkan *Glasgow Climate Pact* yang secara eksplisit berencana untuk mengurangi deforestasi, penggunaan batu bara serta target pengurangan emisi metana. Kesepakatan itu juga mendesak pengurangan emisi serta penggunaan emisi terbarukan dan menjanjikan lebih banyak bantuan pendanaan bagi negara-negara berkembang. Kesepakatan tersebut juga menekankan pentingnya perlindungan, konservasi, restorasi alam dan ekosistem termasuk hutan dan ekosistem darat dan perairan yang berperan sebagai penyerap dan penyimpan GRK, melindungi keanekaragaman hayati dan memastikan pengamanan sosial dan lingkungan untuk mencapai tujuan jangka panjang global.

Pertemuan Negara Para Pihak Konvensi Perubahan Iklim di Paris tahun 2015 (*Conference of Parties, COP 21 UNFCCC*) menyepakati Persetujuan Paris (*Paris Agreement*) dengan tujuan yang tercantum pada Pasal 2 ayat (a) menahan kenaikan suhu global dari tingkat suhu era pre-industrialisasi di bawah 2°C dan terus berupaya untuk membatasi kenaikan suhu sampai 1,5°C. Atas hal tersebut, Indonesia telah meratifikasi Persetujuan

Paris melalui Undang-undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim).

Sebagai *National Focal Point* pada berbagai isu lingkungan hidup terutama pada perubahan iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bertugas untuk menjembatani antara isu pada tingkat internasional dengan kepentingan dan kebijakan nasional. Memperhatikan hal tersebut, KLHK telah mengkoordinasikan penyusunan dokumen Strategi Implementasi NDC, *Roadmap* NDC Mitigasi, LTS-LCCR 2050, serta berbagai peraturan perundangan terkait bidang pengendalian perubahan iklim.

Untuk mencapai target tersebut, pada tahun 2021 berjalan, dilakukan kegiatan penyusunan Rencana Operasional *Forestry and Land Use* (FoLU) Net Sink 2030 dengan pendanaan kegiatan melalui anggaran pada DIPA Ditjen PKTL Tahun 2021. Rencana Operasi Lapangan Indonesia's FOLU 2030 ini merupakan sebuah dokumen perencanaan yang menjabarkan target penurunan emisi gas rumah kaca pada tingkat tapak sektor kehutanan dan penggunaan lahan sampai dengan tahun 2030 sebagaimana dinyatakan dalam LTS-LCCR 2050, updated NDC 2030, serta memperhatikan berbagai instrumen bidang lingkungan hidup dan kehutanan, seperti Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030. Rencana Operasi Lapangan Indonesia's FOLU 2030 memberikan penjelasan atas rencana operasi lapangan dan perencanaan, evaluasi serta pengendalian.

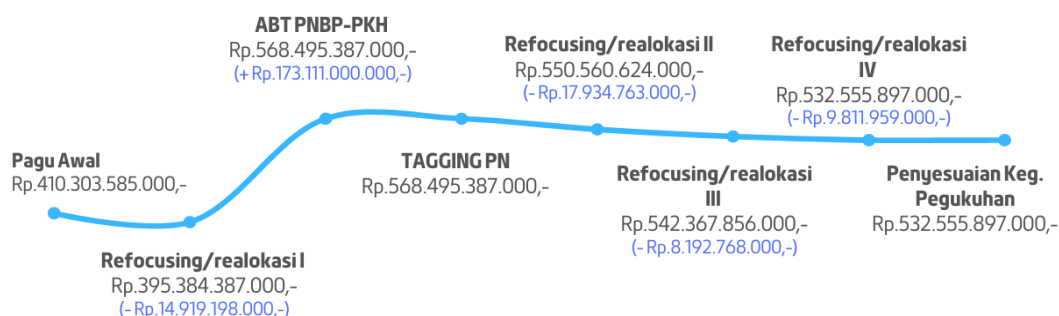
Pada tahun 2022, alokasi anggaran diberikan dalam rangka finalisasi penyusunan Rencana Operasional Folu Net Sink 2030 serta beberapa buku manual pendukung diantaranya IKN, Karhutla, Sustainable Forest Management (SFM), Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Konservasi, Perhutanan Sosial, serta Gambut/mangrove. Proses finalisasi penyusunan dokumen tersebut dilakukan melalui proses pembahasan, diskusi public serta workshop Rencana Operasional Folu Net Sink 2030 dan manual. Selain itu, di tahun 2022 dilakukan penyusunan dokumen Rencana Kawasan Hutan dalam rangka Implementasi Folu Net Sink 2030 di tingkat tapak yakni Wilayah Sumatera dan Kalimantan. Tujuan penyusunan dokumen tersebut antara lain:

- b. Menjabarkan target NDC ke dalam detil rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan pada tingkat propinsi dalam rangka menuju Indonesia Net Sink FOLU 2030;
- c. Menentukan penanggungjawab rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan pada tingkat propinsi dalam rangka menuju Indonesia Net Sink FOLU 2030;
- d. Menetapkan rencana operasional aksi penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan pada tingkat propinsi dalam rangka menuju Indonesia Net Sink FOLU 2030;
- e. Merumuskan tahapan evaluasi terhadap detil rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan pada tingkat propinsi dalam rangka menuju Indonesia Net Sink FOLU 2030.



## B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN PROGRAM TAHUN 2021 DAN TAHUN 2022

Capaian serapan anggaran pada tahun 2021 dan 2022 merupakan jumlah anggaran yang dimanfaatkan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, dengan telah melalui beberapa perubahan anggaran pada beberapa kegiatan prioritas nasional maupun prioritas bidang.

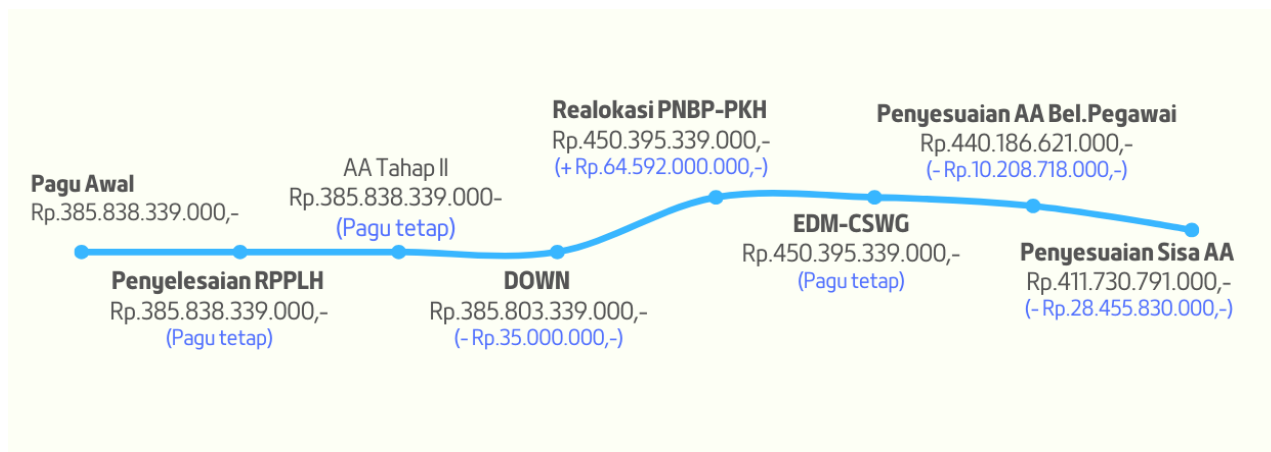


Gambar 12 Perubahan Anggaran tahun 2021

Tabel 7 Serapan Anggaran Ditjen PKTL tahun 2021

(dalam ribu rupiah)

PROGRAM	TAHUN 2021		
	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
Program Kualitas Lingkungan Hidup	25.851.973	25.767.308	99,67%
<i>Pencegahan Dampak Lingkungan</i>	<i>25.851.973</i>	<i>25.767.308</i>	<i>99,67%</i>
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	290.804.691	287.564.401	98,89%
<i>Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan</i>	<i>253.724.471</i>	<i>250.897.760</i>	<i>98,89%</i>
<i>Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan</i>	<i>13.382.143</i>	<i>12.293.427</i>	<i>91,86%</i>
<i>Perencanaan Kawasan Hutan</i>	<i>23.698.077</i>	<i>23.373.214</i>	<i>98,63%</i>
Program Dukungan Manajemen	215.899.233	214.830.111	99,50%
<i>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL</i>	<i>215.899.233</i>	<i>214.830.111</i>	<i>99,50%</i>
<b>Total</b>	<b>532.555.897</b>	<b>528.161.819</b>	<b>99,17%</b>



Gambar 13 Perubahan Anggaran tahun 2022

Tabel 8 Serapan Anggaran Ditjen PKTL tahun 2022

(dalam ribu rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
<b>Program Kualitas Lingkungan Hidup</b>	<b>13.626.223</b>	<b>13.605.861</b>	<b>99,85%</b>
<i>Pencegahan Dampak Lingkungan</i>	13.626.223	13.605.861	99,85%
<b>Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan</b>	<b>172.152.780</b>	<b>171.680.034</b>	<b>99,73%</b>
<i>Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan</i>	133.728.747	133.372.378	99,73%
<i>Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan</i>	10.776.293	10.743.831	99,70%
<i>Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan</i>	27.647.740	27.563.826	99,70%
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>225.951.788</b>	<b>223.937.678</b>	<b>99,11%</b>
<i>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL</i>	225.951.788	223.937.678	99,11%
<b>Total</b>	<b>411.730.791</b>	<b>409.223.574</b>	<b>99,39%</b>

## BAB III. RENCANA KERJA TAHUN 2023

### A. STRATEGI DALAM Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2023

TEMA PEMBANGUNAN RKP 2023	SASARAN PEMBANGUNAN 2023
Tema pembangunan RKP Tahun 2023 adalah " <b>Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan</b> ". Tema tersebut disusun dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2021, evaluasi kebijakan tahun 2022, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN 2020–2024, dinamika pandemi COVID-19, dan isu strategis yang menjadi perhatian	Sasaran pembangunan tahun 2023 diantaranya: (1) mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca; serta (2) peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2023 yakni:



Gambar 14 Tema dan Sasaran Pembangunan RKP 2023 (Perpres 108 Tahun 2022)

Arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2023 dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2023 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023, dimana Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mendukung pada 4 (empat) Prioritas Nasional



Tabel 9 Dukungan Ditjen PKTL tahun 2023 dalam Prioritas Nasional

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PN	RINCIAN OUTPUT
<b>Prioritas Nasional 1 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan</b>			
02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02- Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	02-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP
			SK Penetapan Kawasan Hutan
			Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan
<b>Prioritas Nasional 2 - Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan</b>			

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PN	RINCIAN OUTPUT	
04- Pembangunan Wilayah Kalimantan	03- Pengembangan Kawasan Perkotaan	04- Pembangunan Ibu Kota Negara	Luas Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk IKN	
<b>Prioritas Nasional 3-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing</b>				
06-Pengentasan Kemiskinan	03-Reforma Agraria	01-Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA (termasuk Pelepasan Kawasan Hutan)	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA Data dan Areal Perhutanan Sosial	
<b>Prioritas Nasional 6 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim</b>				
01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01- Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	06-Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKHTL	
			Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi	
	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah		Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL
				Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL
				Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang divalidasi
				Dokumen RPPLH
		Dokumen D3TLH dan Informasi Ekoregion		
		Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan		

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PN	RINCIAN OUTPUT
		02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan pengamanan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Sistem kajian dampak lingkungan Sistem informasi dokumen lingkungan yang dikembangkan Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Dokumen hasil identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan indeks jasa lingkungan tinggi

## B. PROGRAM, SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2023

### 1. Penyesuaian Rencana Kerja Tahun 2023

Dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat 13 (tiga belas) kelompok Indikator Kinerja Utama (IKU) yang masuk ke dalam 5 (lima) program yang memuat 13 (tiga belas) sasaran program dengan nomenklatur sama dengan sasaran strategis dan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Program (IKP) dengan nomenklatur sama dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Redesain Sistem Perencanaan Penganggaran (RSPP). Kebijakan ini diambil dengan pertimbangan bahwa program bukan lagi representasi Unit Kerja Eselon I tetapi menjadi arah dan kebijakan di level kementerian bahkan nasional sehingga sejajar dengan sasaran strategis kementerian. Dari 5 (lima) program KLHK, terdapat 3 (tiga) program yang didukung oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yaitu:

#### a. Program Kualitas Lingkungan Hidup

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran Program Kualitas Lingkungan Hidup adalah meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan.

#### b. Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan adalah menghadirkan tapak hutan yang mampu membantu memulihkan ekonomi nasional. Sebagai entitas pembangunan, geliat ekonomi tapak hutan diupayakan semakin tangguh, terus tumbuh memproduksi barang dan jasa; meningkatkan dan mempertahankan kelestarian hutan baik di hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi.



### **c. Program Dukungan Manajemen**

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran Program Dukungan Manajemen adalah sebagai payung besar dalam upaya peningkatan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan transformasi pelayanan publik dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2023 dijabarkan ke dalam 3 (tiga) program di atas. Pada masing-masing program ditetapkan dengan sasaran program dan indikator kinerja program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas tata kelola kawasan hutan dan lingkungan sekaligus menjawab isu-isu dan kondisi faktual lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan, yang diperkuat melalui pencermatan dan penajaman sesuai rencana pembangunan dalam RKP Tahun 2023.

Untuk mencapai sasaran program di atas, ditetapkan rencana kegiatan dengan rincian output dan target pada masing-masing kegiatan yang telah mengalami penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pada tahun 2023, arah kebijakan penganggaran dan target kinerja pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, antara lain:



Pada tahun 2023 berjalan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah terjadi beberapa perubahan anggaran DIPA tahun 2023 yang tentunya mempengaruhi target dan anggaran yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahun 2023, antara lain terkait penyesuaian target dan kebutuhan anggaran pada kegiatan-kegiatan Prioritas melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) PNB-PKH serta pencadangan *Automatic Adjustment* anggaran Belanja Pegawai dan Belanja Barang yang berdampak pada beberapa target kinerja yang telah diperjanjikan.

**1) Pencadangan *Automatic Adjustment* anggaran Belanja Pegawai dan Belanja Barang**

Menindaklanjuti arahan Presiden RI terkait kondisi geopolitik global serta berkenaan dengan terbitnya surat Menteri Keuangan Nomor S-1040/MK.02/2022 perihal *Automatic Adjustment* (AA) Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mendapat porsi pencadangan anggaran yang bersumber dari sumber dana Rupiah Murni (RM). Pencadangan tersebut diefisienkan dari potensi kelebihan belanja pegawai, serta belanja barang yang dapat diefisienkan, tidak mendesak atau dapat ditunda.

Ditjen PKTL sebagai salah satu Unit Eselon I di KLHK mendapatkan proporsi Rp.136.840.468.000,- yang berasal dari belanja pegawai sebesar Rp.6.599.754.000,- dan belanja non pegawai sebesar Rp. 130.240.714.000. Adapun pencadangan belanja non pegawai dilakukan pada anggaran penyelesaian kegiatan penataan batas kawasan hutan di wilayah BPKHTL sepanjang 16.181,86 km dengan potensi penetapan seluas 5.997.138,98 Hektar.

## **2) Pemantapan Renja KLHK Tahun 2023 Program KLH**

Berdasarkan hasil Trilateral Meeting Pagu Kementerian LHK TA 2023, terjadi ketidaksepakatan pengalokasian pagu antara Kementerian LHK, Kementerian PPN/Bappenas, serta Kementerian Keuangan mengingat anggaran yang dialokasikan belum mempertimbangkan target MP RPJMN 2020-2024 dan rancangan RKP 2023, khususnya pada Priritas Nasional 6 yang masih terdapat gap target. Hasil tersebut menyebabkan terjadinya blokir anggaran pada pagu Kementerian LHK TA 2023 khususnya pada program Kualitas Lingkungan Hidup dan Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Untuk itu, telah dilakukan pembahasan informasi kinerja Rencana Kerja Kementerian LHK Tahun 2023 bersama Kementerian PPN/Bappenas, serta Kementerian Keuangan untuk Program Kualitas Lingkungan Hidup dan Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim membahas pemantapan rencana kerja Kementerian LHK TA 2023 program Kualitas Lingkungan Hidup dan Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Adapun hasil kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam perubahan informasi kinerja pada renja awal Ditjen PKTL sebagaimana terinci pada Lampiran 3.

## **3) Anggaran Belanja Tambahan (ABT) PNBP-PKH**

Sehubungan dengan ijin penggunaan PNBP yang ditetapkan Menteri Keuangan melalui surat nomor S-748/MK.02/2022 tanggal 12 September 2022 hal Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat ijin penggunaan anggaran PNBP PKH sebesar 26% pada tahun 2023. Dengan adanya percepatan penyelesaian kegiatan prioritas pada tahun 2023, terdapat usulan revisi tambahan anggaran belanja sebesar Rp418.590.000.000 yang bersumber dari PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PKH), yang merupakan 26% dari target pendapatan PNBP-PKH dalam APBN Tahun Anggaran 2023. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan pada seluruh satker lingkup Ditjen PKTL sesuai dengan peruntukan penggunaan dana PNBP PKH, diantaranya:

- a. Perencanaan, pengukuhan, dan penatagunaan kawasan hutan, berupa kegiatan percepatan penyelesaian pengukuhan kawasan hutan berupa penyelesaian penataan batas Kawasan dalam rangka penetapan kawasan hutan 100%, penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA, serta koordinasi percepatan pengukuhan kawasan hutan. Selain itu, anggaran dialokasikan untuk pengganti anggaran penyelesaian kegiatan penataan batas kawasan hutan di wilayah

BPKHTL sepanjang 16.181,86 km dengan potensi penetapan seluas 5.997.138,98 Hektar yang menjadi salah satu pencadangan belanja *Automatic Adjustment* (AA).

- b. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan berupa penguatan Data dan Informasi Deforestasi Indonesia, penguatan Database Geospasial SIGAP KLHK untuk mendukung Monitoring Pengendalian Deforestasi; serta pelaksanaan Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL.
- c. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan, berupa penguatan layanan permohonan penggunaan kawasan hutan dan Data Informasi PNBPKH, Verifikasi PNBPKH di wilayah kerja BPKHTL serta Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala.
- d. Penataan dan pencegahan dampak lingkungan, berupa Inventarisasi Lingkungan Hidup, fasilitasi Penetapan DDDT LH Provinsi; penyelesaian dokumen Informasi Geospasial Kawasan Dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan air; pengembangan NSPK, Kelembagaan dan SDM, serta Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan KLHS (baik dalam tata Ruang, RPJMD dan KRP Lainnya); monitoring dan evaluasi KLHS pada IKN, penyusunan dan fasilitasi Penyusunan RPPLH Provinsi dan Kota, serta penguatan Penyelenggaraan Instrumen Ekonomi LH.

Selain itu, dukungan juga dilakukan untuk pemantauan Rona Lingkungan Awal Rencana Kegiatan dan Infrastruktur IKN di Provinsi Kaltim dalam rangka Layanan Dukungan Pengembangan Sistem Kajian Dampak Lingkungan, penguatan sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup, pembentukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi dalam rangka mendukung implementasi UUCK khususnya terkait AMDAL serta percepatan Pelayanan Perizinan Amdal.

- e. Sarana dan Prasarana Pemantapan Kawasan Hutan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas nasional maupun prioritas bidang.
- f. Kegiatan pendukung pemantapan kawasan hutan, berupa pengelolaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, peningkatan kualitas pelayanan dan persepsi korupsi, dukungan pelaksanaan perencanaan kawasan hutan mendukung kebijakan pemanfaatan hutan dan prioritas nasional, maupun koordinasi dukungan pencapaian kegiatan lingkup Ditjen PKTL.

**Tabel 10 Distribusi Pagu belanja tambahan sumber dana PNBPKH Tahun 2023**  
(dalam ribu rupiah)

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	PROPORSI
1	Perencanaan, pengukuhan, dan penatagunaan kawasan hutan	246.791.455	58,96%
2	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	3.601.500	0,86%
3	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan	9.773.771	2,33%
4	Penataan dan pencegahan dampak lingkungan	64.381.783	15,38%
5	Sarana dan Prasarana Pemantapan Kawasan Hutan	68.389.000	16,34%
6	Kegiatan pendukung pemantapan kawasan hutan	25.652.491	6,13%

Adapun perubahan yang terjadi pada target dan anggaran kegiatan prioritas lingkup Ditjen PKTL adalah sebagaimana berikut.

**Tabel 11 Tambahan Target dan Anggaran TA 2023 Pasca ABT PNBP PKH**

RO	TARGET			ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	
	SATUAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI
Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Daerah yang divalidasi	Dokumen	40	65	5.989.813	10.104.813
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup	Rekomendasi Kebijakan	1	2	440.000	960.000
Dokumen RPPLH	Rekomendasi Kebijakan	7	11	700.000	2.106.000
Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) dan Informasi Ekoregion	Rekomendasi Kebijakan	1	35	1.430.000	19.726.008
Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi (65 Juta Ha)	Peta	1	3	1.051.523	3.360.523
Sistem Kajian Dampak Lingkungan	Rekomendasi Kebijakan	40	81	1.301.850	30.716.850
Sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikembangkan	Sistem Informasi	1	1	3.392.235	10.151.235
Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	Layanan	170	271	1.219.350	2.781.125
Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	layanan	1	1	310.000	3.036.400
Telaahan kesesuaian perencanaan penataan	layanan	30	30	200.000	2.200.000

RO	TARGET			ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	
	SATUAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI
ruang (RTRWP/Kab/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan					
Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	layanan	3	3	270.000	699.000
Penyusunan Rencana kehutanan	Rekomendasi Kebijakan	3	8	544.000	2.823.011
Penetapan/perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS KHDTK KHKP KHDPK)	Rekomendasi Kebijakan	1	4	150.000	2.133.000
Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	layanan	44	70	2.961.008	4.781.008
006-Data dan informasi deforestasi	layanan	1	1	125.000	1.056.500
004-Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	layanan	1	1	1.500.000	2.350.000
001-Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan	layanan	300	300	1.888.575	4.954.576
Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Badan usaha	100	213	5.477.852	10.793.872
Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala	layanan	12	12	498.000	1.889.750
SK Penetapan Kawasan Hutan	Rekomendasi Kebijakan	22	29	10.764.901	15.943.799
Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	Rekomendasi Kebijakan	22	29	295.486.444	469.891.418
005-Luas Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk IKH	Layanan	2	2	1.000.000	3.000.000
SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	Rekomendasi Kebijakan	4	24	1.600.000	9.200.000
Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	Rekomendasi Kebijakan	4	24	7.546.080	55.154.292



RO	TARGET			ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	
	SATUAN	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI
Layanan Umum	Layanan	23	23	32.546.186	58.780.637
Layanan Sarana Internal	Unit	55	2625	514.830	53.468.201
Layanan Prasarana Internal	Unit	4	14	2.453.384	17.889.013

**4) Relaksasi dan Realokasi Pencadangan *Automatic Adjustment* anggaran Belanja Pegawai dan Belanja Barang**

Pada tahun 2023 berjalan, telah dilakukan relaksasi dan Realokasi Pencadangan *Automatic Adjustment* anggaran Belanja Pegawai dan Belanja Barang, dengan skema pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran KLHK ke bagian anggaran bendahara umum negara serta relaksasi/pemanfaatan Pencadangan *Automatic Adjustment* anggaran. Berdasarkan tanggapan atas usulan relaksasi/pemanfaatan blokir anggaran sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-286/MK.2/2023, terdapat rincian kegiatan dan anggaran yang dapat dipenuhi melalui relaksasi blokir *Automatic Adjustment* yakni penataan batas kawasan hutan untuk mempercepat target penyelesaian TORA sepanjang 140 km di Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi, terdapat beberapa perubahan pada target kinerja Ditjen PKTL tahun 2023.

VISI KLHK	MISI KLHK	TUJUAN KLHK	SASARAN STRATEGIS	IKP	PROGRAM	SASARAN UKE I	INDIKATOR KINERJA UKE I	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI		
Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat dalam mendukung: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong"	M1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas	T.1. Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap Terhadap Perubahan Iklim	T1.S1. Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup	T1.S1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	029.FD. Kualitas Lingkungan Hidup	T1.S1.1.7. Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan	T1.S1.1.7.1. Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	83 Dokumen	156 Dokumen		
							T1.S1.1.7.2. Meningkatnya kesadaran sektor dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan persetujuan lingkungan	195 Dokumen	296 Dokumen		
			T1.S4. Menurunnya laju penyusutan hutan	T1.S4.1 Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan			029.FF. Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	T1.S4.1.5. Meningkatnya Kesesuaian Implementasi Perencanaan Kehutanan	T1.S4.1.5.1. Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	583 Layanan	583 Layanan
								T1.S4.1.6. Meningkatnya pelayanan data dan informasi sumberdaya hutan	T1.S4.1.6.1. Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	33 layanan	33 layanan
	M2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan	T.2. Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan hidup	T2.S4. Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan kehutanan	T2.S4.1. Nilai PNBPFungsional KLHK	029.FF. Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	T2.S4.1.2. Meningkatnya sumbangan PNBPF dari Penggunaan Kawasan Hutan	T2.S4.1.2.1. Seluruh Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	300 Pemohon	300 Pemohon		
			T3.S1. Tersesainya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate	T3.S1.1 Luas Kawasan Hutan dengan status penetapan			029.FF. Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	T3.S1.1.1. Tersesainya seluruh Kawasan Hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap	T3.S1.1.1.1. Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk Kawasan konservasi)	14,9 Juta Hektar	16,4 Juta Hektar
	M3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara	T.3. Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat yang Berkeadilan	T3.S2. Meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan	T3.S2.1 Luas Kawasan Hutan yang Dilepaskan untuk TORA	029.FF. Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	T3.S2.1.1 Tersesainya pelepasan kawasan hutan untuk TORA		T3.S1.1.2. Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	31 layanan	31 layanan	
							T3.S2.1.1. Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	10,1 Ribu Hektar	21,24 Ribu Hektar		
	M4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	T.4. Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima	T4.S2. Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	T4.S2.1. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	029.WA. Dukungan Manajemen	T4.S2.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK	T4.S2.1.1.1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	82 Poin	82 Poin		

Gambar 15 Penyesuaian Sasaran dan Indikator Kinerja Ditjen PKTL tahun 2023

<b>PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Kegiatan 5436 – Pencegahan Dampak Lingkungan</b>
	UKE II <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (Dit. PDLKWS)</li> <li>• Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan (Dit.PDLUK)</li> <li>• Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL)</li> </ul>

- 1 -----• Penyelesaian Materi Teknis Dokumen RPPLH 2025-2055; Rancangan PP terkait RPPLH, penyelenggaraan verifikasi RPPLH Provinsi dan ibukota provinsi;
- 2 -----• Penyediaan data dan informasi ekoregion, informasi Pendukung D3TLH Lahan Prima, penyelenggaraan fasilitasi D3TLH Daerah serta penyusunan draft Rancangan Permen
- 3 -----• Penyusunan Kebijakan/Rekomendasi Kebijakan/Pedoman terkait pengembangan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup; Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis Penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup; dan Penghitungan Valuasi Ekonomi di Daerah
- 4 -----• Penyelesaian Peta Indikatif Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait Air
- 5 -----• Penguatan Penyelenggaraan KLHS (Pengembangan NSPK, kelembagaan dan SDM KLHS, asistensi teknis/validasi KLHS RTRW dan RPJMD, dan monerv KLHS)
- 6 -----• Peningkatan kapasitas dan kualitas sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup
- 7 -----• Peningkatan Pelayanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan
- 8 -----• Peningkatan pelayanan kajian tata lingkungan di wilayah BPKHTL

**TARGET PRIORITAS TAHUN 2023  
PADA PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP**

Sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, pelaksanaan Program Kualitas Lingkungan Hidup dijabarkan ke dalam **Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan**. Kondisi yang ditargetkan dalam sasaran kegiatan serta indikator kinerja antara lain:

Tabel 12 Penyesuaian Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Program Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		UKE II
		SEMULA	MENJADI	
<b>T1.S1.1.7.1. Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan</b>				
T1.S1.1.7.1.1 Meningkatnya efektivitas KLHS dan instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam upaya pengamanan lingkungan hidup ( <i>Enviromental Safeguard</i> )	T1.S1.1.7.1.1.1 Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan/atau program	30 <i>Dokumen KLHS</i>	65 <i>Dokumen KLHS</i>	Dit. PDLKWS
	T1.S1.1.7.1.1.2 Instrumen ekonomi lingkungan hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan	1 <i>Dokumen</i>	2 <i>Dokumen</i>	Dit. PDLKWS
T1.S1.1.7.1.2 Meningkatnya penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya pengamanan lingkungan hidup ( <i>Enviromental Safeguard</i> )	T1.S1.1.7.1.2.1 RPPLH, D3TLH Nasional dan informasi Ekoregion yang disusun, ditetapkan dan menjadi acuan pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program	9 <i>Dokumen</i>	46 <i>Dokumen</i>	Dit. PDLKWS
T1.S1.1.7.1.3 Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	T1.S1.1.7.1.3.1 Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	22 <i>Layanan</i>	22 <i>Layanan</i>	BPKHTL
T1.S1.1.7.1.4 Tersedianya data dan informasi inventarisasi jasa lingkungan tinggi	T1.S1.1.7.1.4.1 Dokumen informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air	65 Juta <i>Hektar</i>	65 Juta <i>Hektar</i>	Dit. PDLKWS
	T1.S1.1.7.1.4.2 Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH	20 <i>Dokumen</i>	20 <i>Dokumen</i>	BPKHTL

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		UKE II
		SEMULA	MENJADI	
<b>T1.S1.1.7.2 Meningkatnya kesadaran sektor dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan persetujuan lingkungan</b>				
T1.S1.1.7.2.1 Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup	T1.S1.1.7.2.1.1 Sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup	1 Sistem	1 Sistem	Dit PDLUK
T1.S1.1.7.2.2 Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	T1.S1.1.7.2.2.1 Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	22 Layanan	22 Layanan	BPKHTL
T1.S1.1.7.2.3 Meningkatnya Pelayanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	T1.S1.1.7.2.3.1 Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	170 Layanan	271 Layanan	Dit PDLUK
T1.S1.1.7.2.4 Tersedianya dokumen identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	T1.S1.1.7.2.4.1 Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi	2 Layanan	2 Layanan	Dit PDLUK

## PROGRAM PEMBANGUNAN HUTAN BERKELANJUTAN

<b>Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 6744 - Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan</li> <li>2) 5433 - Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan</li> <li>3) 5434 - Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan</li> </ol>
<b>UKE II</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (Dit. RPKHPWPH)</li> <li>• Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan (Dit.PPKH)</li> <li>• Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (Dit. IPSDH)</li> <li>• Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL)</li> </ul>

Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan dijabarkan ke dalam 3 (tiga) kegiatan dengan target kinerja yang akan dicapai dari masing-masing antara lain:

<b>Kegiatan Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyediaan Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP dalam rangka proses review dan perubahan terhadap penetapan wilayah KPH yang mengalami perubahan dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi Pengelolaan kawasan hutan.</li> <li>2) penyediaan Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan yang telah mengakomodir RKTN 2022-2030, melalui telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang dengan kawasan hutan, fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP, serta penetapan/perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan.</li> <li>3) Peningkatan Potensi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan cara meningkatkan pelayanan perizinan PPKH melalui penyederhanaan kebijakan dan percepatan perizinan. Peningkatan dan optimalisasi PNBP-PKH melalui pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembayaran PNBP-PKH oleh wajib bayar untuk menghindari kerugian negara juga menjadi prioritas melalui verifikasi terhadap kewajiban pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</li> <li>4) Penyediaan data areal perhutanan sosial melalui identifikasi areal perhutanan sosial.</li> </ol>
<b>Kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi). Tujuan penetapan kawasan hutan dalam hal ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum atas status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan hutan serta memberikan kepastian dalam pengelolaan kawasan hutan tersebut. Salah satu langkah strategis yang dilakukan pada tahun 2023 yakni percepatan penyelesaian penataan batas kawasan hutan dalam rangka penetapan kawasan hutan</li> </ol>

	<p>100%. Melalui tambahan anggaran ABT PNBP PKH, kegiatan penataan batas kawasan hutan dalam rangka penetapan kawasan hutan 100% selesai dilaksanakan di tahun 2023.</p> <p>2) Penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA, sebagaimana yang telah diamanahkan dalam RPJMN 2020-2024.</p> <p>3) Pelayanan Permohonan Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan hutan dalam rangka pengendalian perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan.</p> <p>4) Penyiapan pelepasan Lahan Ibu Kota dari Kawasan Hutan.</p> <p>5) Penyediaan Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan.</p>
<b>Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan</b>	<p>1) Penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi sumber daya hutan, yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan data dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan kehutanan, perencanaan kawasan hutan dan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor kehutanan (stok, serapan dan emisi karbon) baik di tingkat tapak (Unit pengelolaan/KPH), wilayah, nasional maupun kebutuhan data internasional.</p> <p>2) Penyediaan Layanan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mendukung Kebijakan Satu Peta (<i>One Map Policy</i>). Dalam hal ini, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup KLHK, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melalui Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan (IPSDH) bertugas sebagai Walidata JIG KLHK yang bertanggung jawab melakukan pengumpulan, penjaminan kualitas, dan pengelolaan DG dan IG yang berasal dari Produsen Data Geospasial yaitu eselon II lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta penyebarluasan kepada pengguna yang dibantu oleh 22 Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL), sesuai wilayah kerjanya.</p>

Tabel 13 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		UKE II
		SEMULA	MENJADI	
<b>T1.S4.1.5.1. Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</b>				
T1.S4.1.5.1.1. Tersedianya peta penetapan dan kelembagaan KPH	T1.S4.1.5.1.1.1 Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	530 Peta	530 Peta	Dit. RPKHPWPH
T1.S4.1.5.1.2 Tersedianya Dokumen Rencana Spasial Ruang	T1.S4.1.5.1.2.1 Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/K/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan	30 Layanan	30 Layanan	Dit. RPKHPWPH





SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		UKE II
		SEMULA	MENJADI	
pelayanan permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diproses	<i>Pemohon</i>	<i>Pemohon</i>	
	T3.S1.1.1.2.1.2 Pelayanan permohonan pelepasan kawasan hutan untuk IKN	<i>41,4 Ribu Hektar</i>	<i>41,4 Ribu Hektar</i>	Dit PPKH
<b>T3.S2.1.1.1. Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA</b>				
T3.S2.1.1.1.1 Tersesainya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	T3.S2.1.1.1.1.1 kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	<i>10,1 Ribu Hektar</i>	<i>21,24 Ribu Hektar</i>	Dit PPKH
	T3.S2.1.1.1.1.2 Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	<i>4 Provinsi</i>	<i>24 Provinsi</i>	BPKHTL
<b>T1.S4.1.6.1. Data dan Informasi Sumber Daya Hutan</b>				
T1.S4.1.6.1.1 Tersedia dan termutakhirannya data dan informasi SDH	T1.S4.1.6.1.1.1 Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	<i>3 Dokumen</i>	<i>3 Dokumen</i>	Dit IPSDH
	T1.S4.1.6.1.1.2 Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	<i>2 Laporan</i>	<i>2 Laporan</i>	Dit IPSDH
	T1.S4.1.6.1.1.3. Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	<i>44 Klaster</i>	<i>70 Klaster</i>	BPKHTL
	T1.S4.1.6.1.1.4. Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	<i>2 SK dan Peta</i>	<i>2 SK dan Peta</i>	Dit IPSDH
	T1.S4.1.6.1.1.5. Data dan Informasi Deforestasi Indonesia	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	Dit IPSDH
	T1.S4.1.6.1.1.6 Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	<i>22 Layanan</i>	<i>22 Layanan</i>	BPKHTL
T1.S4.1.6.1.2 Tersedianya layanan informasi dan analisis geospasial tematik LHK	T1.S4.1.6.1.2.1. Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	Dit IPSDH

<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>5432 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</b>
	UKE II	Seluruh Satker Lingkup Ditjen PKTL

Pencapaian Program Dukungan Manajemen dijabarkan ke dalam kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, melalui pencapaian target nilai SAKIP, level maturitas SPIP serta laporan keuangan. SAKIP ini bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya, sehingga instansi tersebut telah berkinerja baik serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) juga dilakukan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan, serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran.

Untuk mendukung sasaran tersebut, berbagai kegiatan dilakukan melalui kegiatan penguatan sumber daya manusia melalui pengembangan SDM; penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung percepatan pelaksanaan kegiatan; melanjutkan Reformasi Birokrasi dalam mendukung pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; transisi Reformasi Struktural, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); memperkuat koordinasi dan sinkronisasi antar satker (pusat dan daerah) dalam rangka pencapaian target dan penyelesaian permasalahan kegiatan.

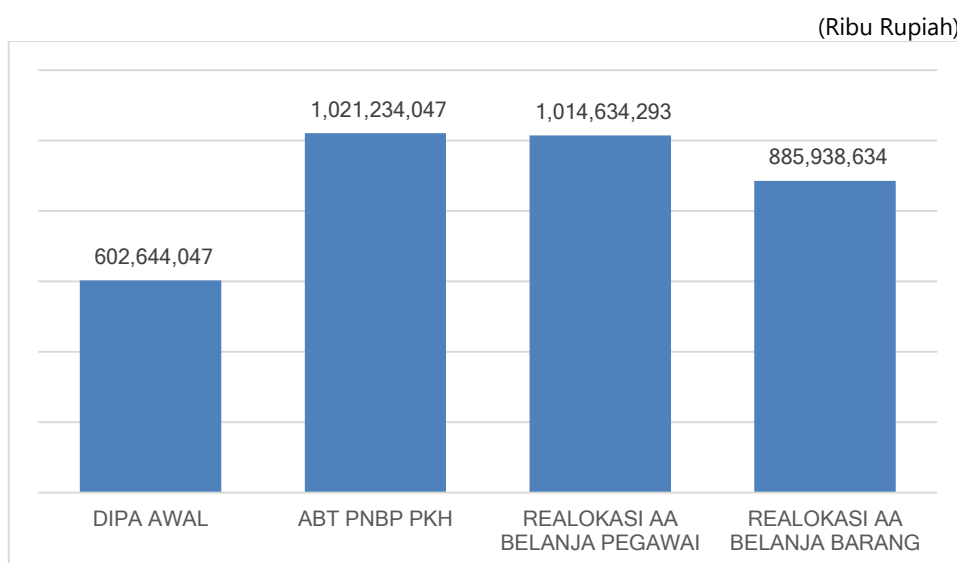
Tabel 14 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		UKE II
		SEMULA	MENJADI	
T4.S2.1.1.1.5 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat	T4.S2.1.1.1.5.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	82 Poin	82 Poin	Seluruh Satker
	T4.S2.1.1.1.5.2 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	3 Level	3 Level	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		UKE II
		SEMULA	MENJADI	
Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	T4.S2.1.1.1.5.3 Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	1 Dokumen	1 Dokumen	

### 3) Kerangka Pendanaan Belanja Tahun 2023

Berdasarkan Memorandum Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor M.38/MENLHK/SETJEN/REN.0/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022 Hal Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2023, Pagu Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2023 telah ditetapkan sebesar Rp.602.644.047.000,-. Sejalan dengan berjalannya tahun 2023, terjadi beberapa kali perubahan anggaran tahun 2023, sehingga berubah menjadi Rp. 885,938,634,000,-



Gambar 16 Perubahan Pagu Alokasi Anggaran Ditjen PKTL Tahun 2023

#### 4) PENGUATAN BELANJA TAHUN 2023 (*BUDGET TAGGING*)

##### 1. Penandaan Anggaran Prioritas Nasional

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan turut berperan dalam mendukung 4 (empat) Prioritas Nasional melalui beberapa program dan kegiatan baik dari segi penguatan upaya pencegahan dampak lingkungan maupun pembangunan hutan berkelanjutan sebesar <b>58,66 %</b> dari total anggaran tahun 2023.	PN / RINCIAN OUTPUT	Anggaran (Ribu rupiah)
	Prioritas Nasional 1 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	358.630.903
	Prioritas Nasional 2 - Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	2.572.000
	Prioritas Nasional 3-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	66.826.943
	Prioritas Nasional 6 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	91.627.554
	<b>TOTAL</b>	<b>519.657.400</b>

##### 2. Penandaan Anggaran Perubahan Iklim (*Climate Budget Tagging*)

Untuk mendukung agenda pemerintah mencapai target pengendalian perubahan iklim, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam hal ini berperan secara tidak langsung sebagai pendukung upaya-upaya mitigasi perubahan iklim dan kebijakan turunannya melalui percepatan penetapan kawasan hutan, pemantapan kawasan hutan yang legal dan legitimate, pemantauan kawasan hutan, penyediaan data dan informasi sumberdaya hutan dan penghitungan laju deforestasi.

Telah dilakukan Penandaan Anggaran Perubahan Iklim (*Climate Budget Tagging*) yakni penandaan anggaran mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Penandaan ini dilakukan untuk memperkuat kerangka fiskal Indonesia dalam rangka implementasi kebijakan lingkungan dan perubahan iklim. Penandaan dimaksud dilakukan dengan memberikan tanda dalam dokumen perencanaan dan anggaran yang berguna untuk menelusuri dan mengidentifikasi besaran anggaran yang digunakan untuk membiayai Output yang spesifik dari kegiatan yang terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim baik yang berdampak langsung maupun yang tidak berdampak langsung (pendukung).

TEMATIK	RO	Anggaran (Ribu rupiah)
004 - Mitigasi perubahan iklim	(1) Sistem Kajian Dampak Lingkungan (2) Sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikembangkan (3) SK Penetapan Kawasan Hutan (4) Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan (5) Luas Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk IKN (6) Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	<b>455.733.531</b> <i>(51,44% dari total pagu Ditjen PKTL tahun 2023)</i>
004 - Mitigasi perubahan iklim, 007 - Adaptasi perubahan iklim (Co-Benefit)	(1) Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Daerah yang divalidasi (2) Dokumen RPPLH (3) Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi (65 Juta Ha) (4) Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah BPKHTL (5) Dokumen hasil identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan indeks jasa lingkungan tinggi	<b>25.092.336</b> <i>(2,83% dari total pagu Ditjen PKTL tahun 2023)</i>

### 3. Penandaan Anggaran Responsif Gender

TEMATIK	Anggaran (Ribu rupiah)
<b>003 - Anggaran Responsif Gender</b>	<b>454.415.382</b> <i>(51,29% dari total pagu Ditjen PKTL tahun 2023)</i>

Tagging dilakukan pada beberapa Rincian Output, yakni:

- (1) Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Daerah yang divalidasi
- (2) Sistem Kajian Dampak Lingkungan
- (3) Sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikembangkan
- (4) Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL
- (5) Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL
- (6) Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan
- (7) Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan
- (8) Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan.

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan Pengarusutamaan Gender, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan memiliki komitmen untuk mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender dalam setiap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Untuk mendukung pencapaian komitmen tersebut telah

## **BAB IV. PENUTUP**

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023 memegang peranan yang sangat penting sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan. Renja ini menjadi acuan dan pedoman bagi segenap satker dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2023.

Rencana kerja ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pada Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan sasaran pembangunan nasional sehingga target kinerja pada akhir tahun periode rencana strategis dapat tercapai.

Dengan penyesuaian anggaran yang tersedia, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berupaya untuk mencapai target-target prioritas yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dengan mengusung langkah-langkah strategis dalam pencapaian sasaran. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tetap berupaya melakukan inovasi-inovasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan agar sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal. Pada akhirnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Selanjutnya, penyesuaian dokumen ini yang nantinya akan menjadi acuan penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tahun 2023 dalam rangka menjaga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2023.



## LAMPIRAN

## Lampiran 1 Matrik Rencana dan Kegiatan Tahun 2023 Ditjen PKTL (Renja Awal)

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	KRO	RO / KOMPONEN	TARGET RO	KEBUTUHAN ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	LOKUS	PRO PN	KP	PP	PN	TEMATIK		
<b>PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP</b>						27.245.771							
<b>Kegiatan : Pencegahan Dampak Lingkungan</b>						27.245.771							
T1.S1.1.7.1.1 Meningkatnya efektivitas KLHS dan instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam upaya pengamanan lingkungan hidup (Environmental Safeguard)	T1.S1.1.7.1.1.1 Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan/atau program.	UBA- Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001-Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis	30	Daerah (Prov/Kab/Kota)	5.989.813	Pusat	01- Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	04- Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	06- Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	003 - Anggaran Responsif Gender, 004 - Mitigasi perubahan iklim, 007 - Adaptasi perubahan iklim	
			051-Penyusunan KLHS berbasis daya dukung dan daya tampung	30	Daerah/Kab/Kota								
	T1.S1.1.7.1.1.2 Instrumen ekonomi lingkungan hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan	PBJ- Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	006-Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan	051-Pengembangan NSPK Instrumen Ekonomi LH	1	Rekomendasi Kebijakan	440.000	Pusat	01- Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	04- Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	06- Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	000 - Bukan Tematik
				052-Fasilitasi dan Monev Penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup	1	dokumen							
					21	laporan							
T1.S1.1.7.1.2 Meningkatnya penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam	T1.S1.1.7.1.2.1 RPPLH, D3TLH Nasional dan informasi Ekoregion yang disusun, ditetapkan dan menjadi acuan pembangunan	PBJ- Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	004-Dokumen RPPLH	7	Rekomendasi Kebijakan	700.000	Pusat	01- Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di	04- Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan	01- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	06- Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	004 - Mitigasi perubahan iklim, 007 - Adaptasi perubahan iklim	
			051-Pengembangan NSPK Penyusunan dan Penetapan RPPLH Nasional	1	Dokumen								
			052-Fasilitasi Penyusunan RPPLH	6	Laporan								

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	KRO	RO / KOMPONEN	TARGET RO		KEBUTUHAN ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	LOKUS	PRO PN	KP	PP	PN	TEMATIK
upaya pengamanan lingkungan hidup (Environmental Safeguard)	suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program		Daerah					Pusat dan Daerah	Lingkungan Hidup			
		PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	005-Dokumen D3TLH dan Informasi Ekoregion	1	Rekomendasi Kebijakan	1.430.000	Pusat	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	000 - Bukan Tematik
			051-Penetapan dan Pengembangan Perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	1	Dokumen							
			052-Inventarisasi LH dan Pemetaan Wilayah Ekoregion	1	Dokumen							
T1.S1.1.7.1.3 Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	T1.S1.1.7.1.3.1 Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	QMA-Data dan Informasi Publik	004-Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	22	Layanan	1.100.000	22 BPKHTL	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	000 - Bukan Tematik
			051-Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	22	Layanan							
T1.S1.1.7.1.4 Tersedianya data dan informasi inventarisasi jasa lingkungan tinggi	T1.S1.1.7.1.4.1 Dokumen informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air	QMA-Data dan Informasi Publik	001-Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	1	Layanan	1.051.523	Pusat	06-Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	004 - Mitigasi perubahan iklim, 007 - Adaptasi perubahan iklim
			051-Penyusunan data dan informasi geospasial kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	65	Juta Ha							
		T1.S1.1.7.1.4.2 Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan	QMA-Data dan Informasi Publik	002-Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa	20	Layanan	9.136.000	20 Provinsi	06-Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman	01-Pencegahan Pencemaran dan	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan	06-Membangun Lingkungan Hidup,

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	KRO	RO / KOMPONEN	TARGET RO	KEBUTUHAN ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	LOKUS	PRO PN	KP	PP	PN	TEMATIK	
	Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKHTL		<b>Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah BPKHTL</b>				man Hayati dan Kerusakan Ekosistem	Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	n Hidup	Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Adaptasi perubahan iklim	
			051-Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif	20	dokumen							
			052-Dukungan Pelaksanaan Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif	20	layanan							
T1.S1.1.7.2.1 Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup	T1.S1.1.7.2.1.1 Sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup	PBJ- Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	<b>007-Sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan yang dikembangkan</b>	<b>1</b>	<b>Rekomendasi Kebijakan/Kajian</b>	<b>4.694.085</b>	Pusat	02- Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04- Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	06- Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	003 - Anggaran Responsif Gender, 004 - Mitigasi perubahan iklim
			051-Evaluasi Kinerja Tim Uji Kelayakan	40	Rekomendasi							
			052-Evaluasi Mutu Dokumen Amdal yang disusun oleh penyusun perorangan dan LPJP	150	Dokumen							
			053-Penyusunan NSPK Bidang Kajian Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	1	NSPK							
			054-Bimbingan Teknis di Bidang Kajian Dampak Lingkungan	1	Laporan							
			055-Pengembangan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup	1	Sistem							
T1.S1.1.7.2.2 Meningkatnya layanan kajian tata	T1.S1.1.7.2.2.1 Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha	QMA-Data dan Informasi Publik	<b>005-Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL</b>	<b>22</b>	<b>Layanan</b>	<b>1.100.000</b>	22 BPKHTL	01- Penguatan Regulasi dan Kelembagaan	04- Penguatan Kelembagaan dan	01- Peningkatan Kualitas Lingkungan	06- Membangun Lingkungan Hidup,	000 - Bukan Tematik

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	KRO	RO / KOMPONEN	TARGET RO		KEBUTUHAN ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	LOKUS	PRO PN	KP	PP	PN	TEMATIK
lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL		051-Fasilitasi kajian dampak lingkungan bidang Usaha dan Kegiatan	22	Layanan			Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	n Hidup	Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	
T1.S1.1.7.2.3 Meningkatnya Pelayanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	T1.S1.1.7.2.3.1 Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	170	Layanan	1.219.350	Pusat	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	000 - Bukan Tematik
			051-Penilaian Amdal Adendum Andal dan RKL RPL serta Penerbitan SKKL	100	Layanan							
			052-Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Penerbitan Persetujuan PKPLH	70	Layanan							
			053-Penilaian audit lingkungan hidup	1	Layanan							
			054-Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) / Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)	1	Laporan							
055-Evaluasi tindak lanjut penyelesaian permasalahan dokumen lingkungan hidup		Laporan										
T1.S1.1.7.2.4 Tersedianya dokumen	T1.S1.1.7.2.4.1Dokumen Hasil Identifikasi dan	QMA-Data dan Informasi	003-Dokumen hasil identifikasi dan pemetaan dampak	1	Dokumen	385.000	Pusat	02-Penguatan Sistem	04-Penguatan Kelembagaan	01-Peningkatan Kualitas	06-Membangun Lingkungan	004 - Mitigasi perubahan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	KRO	RO / KOMPONEN	TARGET RO		KEBUTUHAN ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	LOKUS	PRO PN	KP	PP	PN	TEMATIK
identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi	Publik	lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan indeks jasa lingkungan tinggi					Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	n dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Iklim, 007 - Adaptasi perubahan iklim
			051-Identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	1	Dokumen							
<b>PROGRAM PEMBANGUNAN HUTAN BERKELANJUTAN</b>						<b>335.600.285</b>						
<b>Kegiatan : Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan</b>						<b>9.838.427</b>						
T1.S4.1.5.1.1 Tersedianya peta penetapan dan kelembagaan KPH	T1.S4.1.5.1.1.1 Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	QMA-Data dan Informasi Publik	001-Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	1	layanan	310.000	Pusat	02-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	000 - Bukan Tematik
			051-Penyusunan/Update peta penetapan dan kelembagaan KPH	530	Peta (update)							
T1.S4.1.5.1.2 Tersedianya Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan yang telah mengkomodir RKTN 2022-2030	T1.S4.1.5.1.2.1 Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/K/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	002-Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/Kab/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan	30	layanan	200.000	Pusat	-	-	-	-	000 - Bukan Tematik
			051-Penelaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/Kab/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan	30	Layanan							
	T1.S4.1.5.1.2.2 Fasilitasi usulan	BAH-Pelayanan	003-Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan	3	layanan	270.000	Pusat	-	-	-	-	000 - Bukan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	KRO	RO / KOMPONEN	TARGET RO		KEBUTUHAN ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	LOKUS	PRO PN	KP	PP	PN	TEMATIK
	perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	Publik Lainnya	peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP									Tematik
			051-Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	3	Layanan							
	T1.S4.1.5.1.2.3 Dokumen rencana makro kehutanan dan Telaahan rencana kehutanan pusat dan daerah yang selaras dengan RKTN 2011-2030	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	<b>002-Penyusunan Rencana kehutanan</b>	<b>3</b>	<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	<b>544.000</b>	<b>Pusat</b>	-	-	-	-	004 - Mitigasi perubahan Iklim
			051-Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Dalam Mendukung Pembangunan KPH	1	Rekomendasi Kebijakan							
			052-Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan	1	Rekomendasi Kebijakan							
			053-Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi	1	Rekomendasi Kebijakan							
	T1.S4.1.5.1.2.4 Penetapan/perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS, KHDTK, KHKP, KHDPK)	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	<b>003-Penetapan/perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS KHDTK KHKP KHDPK)</b>	<b>1</b>	<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	<b>150.000</b>	<b>Pusat</b>	-	-	-	-	000 - Bukan Tematik
			051-Penetapan/perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS KHDTK KHKP KHDPK)	1	Rekomendasi Kebijakan							
T1.S4.1.5.1.3 Tersedianya data areal perhutanan sosial	T1.S4.1.5.1.3.1Verifikasi Areal untuk Perhutanan Sosial	QMA-Data dan Informasi Publik	<b>005-Data dan Areal Perhutanan Sosial</b>	<b>1</b>	layanan	<b>500.000</b>	<b>Pusat</b>	<b>01-Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA (termasuk Pelepasan</b>	<b>03-Reforma Agraria</b>	<b>06-Pengentasan Kemiskinan</b>	<b>03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas</b>	<b>000 - Bukan Tematik</b>



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	KRO	RO / KOMPONEN	TARGET RO		KEBUTUHAN ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	LOKUS	PRO PN	KP	PP	PN	TEMATIK		
								Kawasan Hutan)			dan Berdaya Saing			
			051-Data Areal Perhutanan Sosial	1	Dokumen									
T2.S4.1.2.1.1. Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNPB penggunaan kawasan hutan	T2.S4.1.2.1.1.1. Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	300	layanan	1.888.575	Pusat					003 - Anggaran Responsif Gender		
			051-Penelaahan dan Pemantauan Penggunaan Kawasan Hutan	300	Pemohon									
			052-Pemantauan Pembayaran PNPB Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	1	Document									
	T2.S4.1.2.1.1.2. Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	001-Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	100	Badan usaha	5.477.852	19 PROVINS I							
			051-Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	100	Laporan									
			052-Dukungan Pelaksanaan Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	0	Layanan									
	T2.S4.1.2.1.1.3. Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	004-Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala	12	layanan	498.000	Pusat							
			051-Penyusunan/Update Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala	12	Layanan									

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	KRO	RO / KOMPONEN	TARGET RO	KEBUTUHAN ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	LOKUS	PRO PN	KP	PP	PN	TEMATIK	
<b>Kegiatan : Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan</b>					<b>8.472.433</b>							
T1.S4.1.6.1.1 Tersedia dan termutakhirkan data dan informasi SDH	T1.S4.1.6.1.1.1 Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	<b>001-Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan</b>	1	layanan	950.000	Pusat	-	-	-	-	000 - Bukan Tematik
			051-Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan	1	Dokumen							
			052-Penyusunan Data dan Peta Rekalkulasi Penutupan Lahan Nasional	1	Dokumen							
			053-Penyusunan Data dan Peta Hasil Penafsiran Penutupan Lahan Tingkat Unit Pengelolaan		Laporan							
	T1.S4.1.6.1.1.2 Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	<b>007-Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan</b>	2	layanan	250.000	Pusat	-	-	-	-	000 - Bukan Tematik
			051-Penyusunan Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	1	Laporan							
			052-Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Nasional	1	Dokumen							
	T1.S4.1.6.1.1.3 Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	BMA-Data dan Informasi Publik	<b>002-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL</b>	44	layanan	2.961.008	15 Provinsi	-	-	-	-	003 - Anggaran Responsif Gender, 004 - Mitigasi perubahan iklim
			051-Inventarisasi Hutan Nasional	44	Klaster							
			052-Dukungan Pelaksanaan Inventarisasi Hutan Nasional	0	Layanan							

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	KRO	RO / KOMPONEN	TARGET RO	KEBUTUHAN ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	LOKUS	PRO PN	KP	PP	PN	TEMATIK
	T1.S4.1.6.1.1.4 Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Peretujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	BMA-Data dan Informasi Publik	005-Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Peretujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	2	layanan	375.000	Pusat	-	-	-	000 - Bukan Tematik
051-Pengolahan Data dan Informasi Areal Indikatif			1	SK dan Peta							
052-Pelayanan Permohonan Revisi Areal Indikatif			1	Laporan							
	T1.S4.1.6.1.1.5 Data dan Informasi Deforestasi Indonesia	BMA-Data dan Informasi Publik	006-Data dan informasi deforestasi	1	layanan	125.000	Pusat	-	-	-	000 - Bukan Tematik
051-Pengolahan Data Deforestasi Indonesia			1	Layanan							
052-Penyusunan Buku Deforestasi Indonesia			1	Buku							
053-Monitoring Pengendalian Deforestasi			1	Laporan							
	T1.S4.1.6.1.1.6 Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	BMA-Data dan Informasi Publik	003-Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	22	layanan	2.311.425	22 BPKHTL	-	-	-	003 - Anggaran Responsif Gender, 004 - Mitigasi perubahan iklim
051-Penafsiran Citra satelit Resolusi sedang untuk Update Data penutupan Lahan tingkat Nasional			22	BPKH							
052-Dukungan Pelaksanaan Penafsiran Citra satelit Resolusi sedang untuk Update			0	Layanan							

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	KRO	RO / KOMPONEN	TARGET RO		KEBUTUHAN ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	LOKUS	PRO PN	KP	PP	PN	TEMATIK
			Data penutupan Lahan tingkat Nasional									
T1.S4.1.6.1.2 Tersedianya layanan informasi dan analisis geospasial tematik LHK	T1.S4.1.6.1.2.1 Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	BMA-Data dan Informasi Publik	004-Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	1	layanan	1.500.000	Pusat	-	-	-	-	000 - Bukan Tematik
			051-Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik LHK yang Terintegrasi dengan Portal Nasional	1	Layanan							
Kegiatan : Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan						317.289.425						
T3.S1.1.1.1.1 Tersesainya penetapan seluruh kawasan hutan	T3.S1.1.1.1.1.1 Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	003-SK Penetapan Kawasan Hutan	22	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	10.764.901	Pusat	02-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	004 - Mitigasi perubahan iklim
			051-Penelaahan substansi Penetapan Kawasan Hutan	22	Provinsi							
			053-Pengendalian Penataan Batas Kawasan Hutan dalam rangka penetapan Kawasan Hutan	22	Layanan							
			055-Penelaahan Sustansi Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan	34	Layanan							
			056-Pelayanan Tata Batas Unit Pengelolaan	1	Layanan							
	T3.S1.1.1.1.1.2 Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	001-Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	1	Layanan	500.000	Pusat	-	-	-	-	000 - Bukan Tematik
			051-Pengelolaan data dan informasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	1	Layanan							

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	KRO	RO / KOMPONEN	TARGET RO		KEBUTUHAN ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	LOKUS	PRO PN	KP	PP	PN	TEMATIK
			052-Pengelolaan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawsasan hutan	1	Dokumen							
	T3.S1.1.1.1.1.3 Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	<b>002-Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan</b>	22	<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	295.486.444	22 Provinsi	02-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	003 - Anggaran Responsif Gender, 004 - Mitigasi perubahan iklim
051-Penataan batas kawasan hutan (reguler)			40.534	Km								
052-Dukungan Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan (Reguler)			1	Layanan								
T3.S1.1.1.2.1 Terselesaikannya pelayanan permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	T3.S1.1.1.2.1.1 Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diproses	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	<b>001-Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan</b>	30	Layanan	392.000	Pusat	-	-	-	-	000 - Bukan Tematik
			051-Pelayanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	30	layanan							
			052-Pengendalian perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	1	Layanan							
			053-Pengelolaan database perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	1	Layanan							
			054-Evaluasi data pelepasan dan tukar menukar kawasan hutan	1	Layanan							
	T3.S1.1.1.2.1.2 Pelayanan permohonan pelepasan	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	<b>005-Luas Kawasan Hutan yang dilepaskan Untuk IKN</b>	2	Layanan	1.000.000	Pusat	04-Pembangunan Ibu Kota Negara	03-Pengembangan Kawasan Perkotaan	04-Pembangunan Wilayah	02-Mengembangkan Wilayah untuk	004 - Mitigasi perubahan iklim
051-Penyelesaian	41.400	Hektar										

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	KRO	RO / KOMPONEN	TARGET RO	KEBUTUHAN ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	LOKUS	PRO PN	KP	PP	PN	TEMATIK	
	kawasan hutan untuk IKN		pelepasan kawasan hutan untuk IKN						Kalimantan	Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan		
T3.S2.1.1.1.1 Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	T3.S2.1.1.1.1.1 Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	PBV- Kebijakan Bidang Kehutanan	004-SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	4	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	1.600.000	Pusat	01-Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA (termasuk Pelepasan Kawasan Hutan)	03-Reforma Agraria	06-Pengentasan Kemiskinan	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	000 - Bukan Tematik
			051-Penyelesaian Pelepasan Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk TORA	10	ribu Hektar							
			052-Pemutakhiran Data dan Peta TORA	4	Dokumen							
	T3.S2.1.1.1.1.2 Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	PBV- Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	4	Rekomendasi Kebijakan	7.546.080	5 Provinsi	01-Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA (termasuk Pelepasan Kawasan Hutan)	03-Reforma Agraria	06-Pengentasan Kemiskinan	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	003 - Anggaran Responsif Gender, 004 - Mitigasi perubahan Iklim
			051-Inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	-	Hektar							
			052-Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	1.099	Km							
			053-Dukungan Pelaksanaan Inventarisasi verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	4	Layanan							
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>						<b>39.797.991</b>						
<b>Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</b>						<b>239.797.991</b>						
T4.S2.1.1.1.5 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile,	T4.S2.1.1.1.5.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	23	Layanan	32.546.186	Seluruh Satker	-	-	-	-	000 - Bukan Tematik
			051-Layanan Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran	5	Dokumen							
			052-Layanan	6	Dokumen							

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	KRO	RO / KOMPONEN	TARGET RO	KEBUTUHAN ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	LOKUS	PRO PN	KP	PP	PN	TEMATIK
efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tata Lingkungan  T4.S2.1.1.1.5.2 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan  T4.S2.1.1.1.5.3 Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel		Pemantauan dan Evaluasi								
			053-Layanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	2	Dokumen						
			056-Layanan Pengelolaan Data dan Informasi	3	Dokumen						
			059-Layanan Dukungan Manajemen Satker BPKHTL	22	Layanan						
			060-Layanan Dukungan Manajemen Direktorat PPKH	1	Layanan						
			061-Layanan Dukungan Management Direktorat IPSDH	1	Layanan						
			062-Layanan Dukungan Manajemen Direktorat RPKHPWPH	1	Layanan						
			063-Layanan Dukungan Manajemen Direktorat PDLKWS	1	Layanan						
			064-Layanan Dukungan Manajemen Direktorat PDLUK	1	Layanan						
			065-Layanan Pengelolaan Kepegawaian	1	Layanan						
			066-Layanan Pengelolaan kepegawaian Jabatan Fungsional	1	Layanan						
			067-Layanan Organisasi dan Tatalaksana	1	Layanan						
			068-Layanan Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara	1	layanan						



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	KRO	RO / KOMPONEN	TARGET RO		KEBUTUHAN ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	LOKUS	PRO PN	KP	PP	PN	TEMATIK
			069-Layanan kearsipan	1	Layanan							
			070-Layanan Rancangan Peraturan Perundangan	1	layanan							
			071-Layanan Pertimbangan dan Advokasi Hukum	1	Layanan							
			072-Layanan Kerjasama Teknik	1	Layanan							
			073-Layanan Ketatausahaan Setditjen PKTL	1	Layanan							
		<b>EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>	<b>994-Layanan Perkantoran</b>	<b>23</b>	<b>Layanan</b>	<b>204.283.591</b>	<b>Seluruh Satker</b>					
			001-Gaji dan Tunjangan	23	Layanan							
			002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	23	Layanan							
		<b>EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>	<b>951-Layanan Sarana Internal</b>	<b>55</b>	<b>Unit</b>	<b>514.830</b>						
			051-pengadaan kendaraan bermotor	0	Unit							
			052-Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	9	Unit							
			053-Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	46	Unit							
			971-Layanan Prasarana Internal	4	Unit							
		<b>EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>	<b>971-Layanan Prasarana Internal</b>	<b>4</b>	<b>Unit</b>	<b>2.453.384</b>						
			051-Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	4	Unit							
<b>TOTAL</b>						<b>602.644.047</b>						

## Lampiran 2 Dukungan/Modalitas Kegiatan Tahun 2023 Lingkup Ditjen PKTL

SASARAN UKE I	INDIKATOR UKE I	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	RO	MODALITAS			
					REGULASI	UNIT PENANGGUNG JAWAB / SDM	SARANA PENDUKUNG	
<b>PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP</b>								
<b>Kegiatan : Pencegahan Dampak Lingkungan</b>								
T1.S1.1.7 Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan	T1.S1.1.7.1 Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/ Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	T1.S1.1.7.1.1 Meningkatnya efektivitas KLHS dan instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam upaya pengamanan lingkungan hidup ( <i>Environmental Safeguard</i> )	T1.S1.1.7.1.1.1 Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan/atau program.	001-Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis	UU 32 Tahun 2009 ttg Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan,  UU 4 Tahun 2011 ttg Informasi Geospasial  PP 46 Tahun 2017 ttg IELH  PP 22 tahun 2021 ttg Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan LH	Ditjen PKTL dengan koordinasi (PIC): Direktorat PDLKWS  Jumlah SDM yang tersedia pada Direktorat PDLKWS ±52 orang  Pengendali Dampak Lingkungan sebanyak 5 orang  Jumlah SDM yang tersedia pada 22 BPKHTL (± 1.294 org)	Dukungan Peralatan Teknis seperti Laptop/Komputer, Plotter	
			T1.S1.1.7.1.2 Meningkatnya penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya pengamanan lingkungan hidup ( <i>Environmental Safeguard</i> )	T1.S1.1.7.1.2.1 RPPLH, D3TLH Nasional dan informasi Ekoregion yang disusun, ditetapkan dan menjadi acuan pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program	006-Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan  004-Dokumen RPPLH  005-Dokumen D3TLH dan Informasi Ekoregion			PermenLHK 46 Tahun 2016 ttg Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
			T1.S1.1.7.1.3 Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	T1.S1.1.7.1.3.1 Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	004-Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL			Peraturan Direktur Jenderal PKTL no.P4/PKTL/PDLKWS/PLA.3/4/2021 ttg Petunjuk Teknis Verifikasi Lapangan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait dengan Air  SK MenLHK 297 tahun 2019 ttg Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional
			T1.S1.1.7.1.4 Tersedianya data dan informasi inventarisasi jasa lingkungan tinggi	T1.S1.1.7.1.4.1 Dokumen informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air	001-Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi			
				T1.S1.1.7.1.4.2 Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKHTL	002-Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah			

SASARAN UKE I	INDIKATOR UKE I	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	RO	MODALITAS		
					REGULASI	UNIT PENANGGUNG JAWAB / SDM	SARANA PENDUKUNG
				BPKHTL			
	T1.S1.1.7.2 Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan persetujuan lingkungan	T1.S1.1.7.2.1 Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup  T1.S1.1.7.2.2 Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL  T1.S1.1.7.2.3 Meningkatnya Pelayanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan  T1.S1.1.7.2.4 Tersedianya dokumen identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	T1.S1.1.7.2.1.1 Sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup  T1.S1.1.7.2.2.1 Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL  T1.S1.1.7.2.3.1 Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan  T1.S1.1.7.2.4.1 Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi	007-Sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan yang dikembangkan  005-Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL  001-Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan  003-Dokumen hasil identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan indeks jasa lingkungan tinggi	UU 32 Tahun 2009 ttg Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan,  PP 22 tahun 2021 ttg Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan LH  PP 5 tahun 2021 ttg Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Ditjen PKTL dengan koordinasi (PIC): Direktorat PDLUK  Jumlah SDM yang tersedia pada Direktorat PDLKWS ±54 orang  Pengendali Dampak Lingkungan sebanyak 18 orang  Jumlah SDM yang tersedia pada 22 BPKHTL (± 1.294 org)	Dukungan Peralatan Teknis seperti Laptop/ Komputer, Plotter
<b>PROGRAM PEMBANGUNAN HUTAN BERKELANJUTAN</b>							
<b>Kegiatan : Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan</b>							
T1.S4.1.5 Meningkatnya Kesesuaian Implementasi Perencanaan Kehutanan	T1.S4.1.5.1 Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	T1.S4.1.5.1.1 Tersedianya peta penetapan dan kelembagaan KPH  T1.S4.1.5.1.2 Tersedianya Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan yang telah mengakomodir RKTN 2022-2030	T1.S4.1.5.1.1.1 Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP  T1.S4.1.5.1.2.1 Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/K/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan  T1.S4.1.5.1.2.2 Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan	001-Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP  002-Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/Kab/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan  003-Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan	PP 23 Tahun 2021 ttg Penyelenggaraan Kehutanan  PermenLHK 7 Tahun 2021 ttg Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan  Permenhut P.01/menhut-	Ditjen PKTL dengan koordinasi (PIC): Direktorat RPKHPWPH  Jumlah SDM yang tersedia pada Direktorat RPKHPWPH ±95 orang	Dukungan Peralatan Teknis seperti Laptop/ Komputer, Plotter

SASARAN UKE I	INDIKATOR UKE I	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	RO	MODALITAS		
					REGULASI	UNIT PENANGGUNG JAWAB / SDM	SARANA PENDUKUNG
			peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	II/2012 ttg Pedoman Penyusunan RKTP		
			T1.S4.1.5.1.2.3 Dokumen rencana makro kehutanan dan Telaahan rencana kehutanan pusat dan daerah yang selaras dengan RKTN 2011-2030	002-Penyusunan Rencana kehutanan	PermenLHK P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 ttg Perhutanan Sosial		
			T1.S4.1.5.1.2.4 Penetapan/ perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS, KHDTK, KHKP, KHDPK)	003-Penetapan/perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS KHDTK KHKP KHDPK)			
		T1.S4.1.5.1.3 Tersedianya data areal Perhutanan Sosial	T1.S4.1.5.1.3.1 Verifikasi Areal untuk Perhutanan Sosial	005-Data dan Areal Perhutanan Sosial			
T2.S4.1.2 Meningkatnya sumbangan PNBPN dari Penggunaan Kawasan Hutan	T2.S4.1.2.1 Seluruh Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	T2.S4.1.2.1.1. Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNBPN penggunaan kawasan hutan	T2.S4.1.2.1.1.1. Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan	001-Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan	PP 23 Tahun 2021 ttg Penyelenggaraan Kehutanan  PermenLHK 7 Tahun 2021 ttg Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan	Ditjen PKTL dengan koordinasi (PIC): Direktorat RPKHPWPH  Jumlah SDM yang tersedia pada Direktorat RPKHPWPH ±95 orang  Jumlah SDM yang tersedia pada 22 BPKHTL (± 1.294 org)	
			T2.S4.1.2.1.1.2. Hasil Verifikasi PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	001-Hasil Verifikasi PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL			
			T2.S4.1.2.1.1.3. Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala	004-Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala			
<b>Kegiatan : Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan</b>							
T1.S4.1.6 Meningkatnya pelayanan data dan informasi sumberdaya	T1.S4.1.6.1 Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	T1.S4.1.6.1.1 Tersedia dan termutakhirannya data dan informasi SDH	T1.S4.1.6.1.1.1 Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	001-Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	PP 23 Tahun 2021 ttg Penyelenggaraan Kehutanan  Perpres 9 tahun 2016 ttg	Ditjen PKTL dengan koordinasi (PIC): Direktorat IPSDH	Dukungan peralatan Teknis : GPS (± 1.207 unit)

SASARAN UKE I	INDIKATOR UKE I	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	RO	MODALITAS		
					REGULASI	UNIT PENANGGUNG JAWAB / SDM	SARANA PENDUKUNG
hutan			T1.S4.1.6.1.1.2 Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	007-Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	Percepatan Pelaksanaan KSP PermenLHK 7 Tahun 2021 ttg Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan  Perdirjen PKTL P.1/PKTL/IPSDH/PLA.1/1.2017 ttg petunjuk Teknis Inventarisasi Hutan dan Sosial Budaya Masyarakat pada KPHL dan KPHP.	Jumlah SDM yang tersedia pada Direktorat IPSDH ±67 orang  Jumlah SDM yang tersedia pada 22 BPKHTL (± 1.294 org)	Kompas (±527 unit) Spiegel Relascope (±191 unit)
			T1.S4.1.6.1.1.3 Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	002-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL			
			T1.S4.1.6.1.1.4 Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	005-Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut			
			T1.S4.1.6.1.1.5 Data dan Informasi Deforestasi Indonesia	006-Data dan informasi deforestasi			
			T1.S4.1.6.1.1.6 Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	003-Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL			
			T1.S4.1.6.1.2 Tersedianya layanan informasi dan analisis geospasial tematik LHK	004-Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK			
<b>Kegiatan : Penguahan dan Penatagunaan Kawasan Hutan</b>							
T3.S1.1.1 Terselesaikannya seluruh Kawasan Hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap	T3.S1.1.1.1 Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)	T3.S1.1.1.1 Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	T3.S1.1.1.1.1 Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)	003-SK Penetapan Kawasan Hutan	PP 21 Tahun 2021 ttg Penyelenggaraan Penataan Ruang  PP 23 Tahun 2021 ttg Penyelenggaraan Kehutanan  PermenLHK 7 Tahun 2021 ttg Perencanaan Kehutanan, Perubahan	Ditjen PKTL dengan koordinasi (PIC): Direktorat PPKH  Jumlah SDM yang tersedia pada Direktorat PPKH ±115 orang  Jumlah SDM yang	Dukungan peralatan Teknis : GPS (± 1.207 unit) Kompas (±527 unit)
			T3.S1.1.1.1.2 Informasi dan dokumentasi penguahan dan penatagunaan kawasan hutan	001-Informasi dan dokumentasi penguahan dan penatagunaan kawasan hutan			
			T3.S1.1.1.1.3 Panjang Batas Kawasan Hutan Yang	002-Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah			

SASARAN UKE I	INDIKATOR UKE I	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	RO	MODALITAS		
					REGULASI	UNIT PENANGGUNG JAWAB / SDM	SARANA PENDUKUNG
			Telah Diselesaikan Hak- Hak Pihak Ketiga	Diselesaikan	Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan	tersedia pada 22 BPKHTL (± 1.294 org)	
			T3.S1.1.1.1.4 Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	002-Layanan Pengendalian pemantapan kawasan hutan			
	T3.S1.1.1.2 Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	T3.S1.1.1.2.1 Terselesaikannya pelayanan permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	T3.S1.1.1.2.1.1 Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diproses	001-Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	PermenLHK 8 Tahun 2021 ttg Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		
			T3.S1.1.1.2.1.2 Pelayanan permohonan pelepasan kawasan hutan untuk IKN	005-Luas Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk IKN			
T3.S2.1.1 Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	T3.S2.1.1.1 Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	T3.S2.1.1.1.1 Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	T3.S2.1.1.1.1.1 kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	004-SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	Perpres 88 Tahun 2017 ttg Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan		
			T3.S2.1.1.1.1.2Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	001-Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan			
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>							
<b>Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</b>							
T4.S2.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK	T4.S2.1.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	T4.S2.1.1.1.5 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	T4.S2.1.1.1.5.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan T4.S2.1.1.1.5.2 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan T4.S2.1.1.1.5.3 Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	962-Layanan Umum 994-Layanan Perkantoran 951-Layanan Sarana Internal 971-Layanan Prasarana Internal	Keputusan MenLHK Nomor 975 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KLHK	Ditjen PKTL dengan koordinasi (PIC): SETDITJEN PKTL  Jumlah SDM yang tersedia pada Ditjen PKTL ± 1.782 orang	

### Lampiran 3 Matriks Semula Menjadi Informasi Kinerja Renja Ditjen PKTL TA 2023 Pasca Pemanjapan Renja KLHK Tahun 2023 Program KLH

PROGRAM	KEGIATAN	SEMULA					MENJADI				
		KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	ALOKASI	KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	ALOKASI
029.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	5436-Pencegahan Dampak Lingkungan	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	004-Dokumen RPPLH	7	Rekomendasi Kebijakan	700.000	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	004-Dokumen RPPLH	7	Rekomendasi Kebijakan	700.000
			051-Pengembangan NSPK Penyusunan dan Penetapan RPPLH Nasional	1	Dokumen	670.298		051-Pengembangan NSPK Penyusunan dan Penetapan RPPLH Nasional	1	Rekomendasi Kebijakan	670.298
			052-Fasilitasi Penyusunan RPPLH Daerah	6	Laporan	29.702		052-Fasilitasi Penyusunan RPPLH Daerah	6	Rekomendasi Kebijakan	29.702
029.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	5436-Pencegahan Dampak Lingkungan	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	005-Dokumen D3TLH dan Informasi Ekoregion	1	Rekomendasi Kebijakan	1.430.000	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	005-Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) dan Informasi Ekoregion	1	Rekomendasi Kebijakan	1.430.000
			051-Penetapan dan Pengembangan Perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	1	Dokumen	1.000.000		051-Inventarisasi LH dan Pemetaan Wilayah Ekoregion	1	Dokumen	1.000.000
			052-Inventarisasi LH dan Pemetaan Wilayah Ekoregion	1	Dokumen	430.000		052-Penetapan dan Pengembangan Perangkat D3TLH	1	Rekomendasi Kebijakan	430.000
029.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	5436-Pencegahan Dampak Lingkungan	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	006-Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan	1	Rekomendasi Kebijakan	440.000	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	006-Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup	1	Rekomendasi Kebijakan	440.000
			051-Pengembangan NSPK Instrumen Ekonomi LH	1	dokumen	188.300		051-Penetapan dan fasilitasi implementasi Instrumen Ekonomi LH	1	Rekomendasi Kebijakan	440.000
			052-Fasilitasi dan Monev Penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup	21	laporan	251.700					

PROGRAM	KEGIATAN	SEMULA					MENJADI				
		KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	ALOKASI	KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	ALOKASI
029.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	5436-Pencegahan Dampak Lingkungan	QMA-Data dan Informasi Publik	001-Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	1	Layanan	1.051.523	QMA-Data dan Informasi Publik	001-Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi (65 Juta Ha)	1	Peta	1.051.523
			051-Penyusunan data dan informasi geospasial kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	65	Juta Ha	1.051.523		051-Penyusunan data dan informasi geospasial kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	1	Peta	1.051.523
029.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	5436-Pencegahan Dampak Lingkungan	UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001-Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis	30	Daerah (Prov/Kab/Kota)	5.989.813	QAH-Pelayanan Publik lainnya	004 - Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Daerah yang divalidasi	40	Dokumen	5.989.813
			051-Penyusunan KLHS berbasis daya dukung dan daya tampung	30	Daerah/Kab/Kota	5.989.813		051-Validasi KLHS daerah berbasis daya dukung dan daya tampung	40	Dokumen	5.989.813
029.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	5436-Pencegahan Dampak Lingkungan	QMA-Data dan Informasi Publik	002-Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah BPKHTL	20	Layanan	9.136.000	QMA-Data dan Informasi Publik	002-Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah BPKHTL	20	Dokumen	9.136.000
			051-Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif	20	dokumen	9.136.000		051-Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif	20	dokumen	9.136.000
			052-Dukungan Pelaksanaan Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif	20	layanan						
029.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	5436-Pencegahan Dampak Lingkungan	QMA-Data dan Informasi Publik	004-Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja	22	Layanan	1.100.000	QAH-Layanan Publik Lainnya	002-Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	22	Layanan	1.100.000



PROGRAM	KEGIATAN	SEMULA					MENJADI				
		KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	ALOKASI	KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	ALOKASI
			<b>BPKHTL</b>								
			051-Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	22	Layanan	1.100.000		051-Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	22	Layanan	1.100.000
<b>029.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup</b>	<b>5436-Pencegahan Dampak Lingkungan</b>	<b>QMA-Data dan Informasi Publik</b>	<b>005-Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL</b>	<b>22</b>	<b>Layanan</b>	<b>1.100.000</b>	<b>QAH-Layanan Publik Lainnya</b>	<b>003-Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL</b>	<b>22</b>	<b>Layanan</b>	<b>1.100.000</b>
			051-Fasilitasi kajian dampak lingkungan bidang Usaha dan Kegiatan	22	Layanan	1.100.000		051-Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	22	Layanan	1.100.000
<b>029.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup</b>	<b>5436-Pencegahan Dampak Lingkungan</b>	<b>PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup</b>	<b>007-Sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan yang dikembangkan</b>	<b>1</b>	<b>Rekomendasi Kebijakan/Kajian</b>	<b>4.694.085</b>	<b>PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup</b>	<b>007-Sistem Kajian Dampak Lingkungan</b>	<b>40</b>	<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	<b>1.301.850</b>
			051-Evaluasi Kinerja Tim Uji Kelayakan	40	Rekomendasi	475.340		051-Evaluasi Kinerja Tim Uji Kelayakan (Komisi Penilai Amdal)	40	Rekomendasi Kebijakan	475.340
			052-Evaluasi Mutu Dokumen Amdal yang disusun oleh penyusun perorangan dan LPJP	150	Dokumen	266.160		052-Evaluasi Mutu Dokumen Amdal	50	Dokumen	266.160
			053-Penyusunan NSPK Bidang Kajian Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	1	NSPK	264.150		053-Penyusunan NSPK Bidang Kajian Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	1	NSPK	264.150
			054-Bimbingan Teknis di Bidang Kajian Dampak Lingkungan	1	Laporan	296.200		054-Bimbingan Teknis di Bidang Kajian Dampak Lingkungan	1	Laporan	296.200
			055-Pengembangan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup	1	Sistem	3.392.235					

PROGRAM	KEGIATAN	SEMULA					MENJADI				
		KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	ALOKASI	KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	ALOKASI
							UAB- Sistem Informasi Pemerintahan	001-Sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikembangkan	1	Sistem Informasi	3.392.235
								051-Pengembangan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup	1	Sistem Informasi	3.392.235
029.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	5436-Pencegahan Dampak Lingkungan	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	170	Layanan	1.219.350	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	001 - Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	170	Layanan	1.219.350
			051-Penilaian Amdal Adendum Andal dan RKL RPL serta Penerbitan SKKL	100	Layanan	413.294		051-Penilaian Amdal, Adendum Andal dan RKL RPL, serta Penerbitan SKKL	75	Layanan	413.294
			052-Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Penerbitan Persetujuan PKPLH	70	Layanan	172.300		052-Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Penerbitan Persetujuan PKPLH	60	Layanan	172.300
			053-Penilaian audit lingkungan hidup	1	Layanan	210.000		053-Penilaian audit lingkungan hidup	15	Layanan	210.000
			054-Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) / Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)	1	Laporan	213.756		054-Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) / Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)	20	Layanan	213.756
			055-Evaluasi tindak lanjut penyelesaian permasalahan dokumen lingkungan hidup		Laporan	210.000		055-Evaluasi tindak lanjut penyelesaian permasalahan dokumen lingkungan hidup	1	Dokumen	210.000

PROGRAM	KEGIATAN	SEMULA					MENJADI				
		KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	ALOKASI	KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	ALOKASI
029.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	5436-Pencegahan Dampak Lingkungan	QMA-Data dan Informasi Publik	003-Dokumen hasil identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan indeks jasa lingkungan tinggi	1	Dokumen	385.000	QMA-Data dan Informasi Publik	003-Dokumen hasil identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan indeks jasa lingkungan tinggi	1	Dokumen	385.000
			051-Identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	1	Dokumen	385.000		051-Identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	1	Dokumen	385.000

#### Lampiran 4 Penyesuaian Matriks Renja Ditjen PKTL Tahun 2023

KEGIATAN	UKE II	KRO	RO	PEMANTAPAN RENJA 2023 (KLH dan KBPI)			REV RENJA-ABT PNPB PKH 2023			RENJA 2023 (UPDATE)		
				TARGET	SATUAN	ALOKASI	TARGET	SATUAN	ALOKASI	TARGET	SATUAN	ALOKASI
5436-Pencegahan Dampak Lingkungan	05-Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	004-Dokumen RPPLH	7	Rekomendasi Kebijakan	700.000	11	Rekomendasi Kebijakan	2.106.000	11	Rekomendasi Kebijakan	2.106.000
5436-Pencegahan Dampak Lingkungan	05-Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	005-Dokumen Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) dan Informasi Ekoregion	1	Rekomendasi Kebijakan	1.430.000	35	Rekomendasi Kebijakan	19.726.008	35	Rekomendasi Kebijakan	19.726.008
5436-Pencegahan Dampak Lingkungan	05-Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	006-Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup	1	Rekomendasi Kebijakan	440.000	2	Rekomendasi Kebijakan	960.000	2	Rekomendasi Kebijakan	960.000
5436-Pencegahan Dampak Lingkungan	05-Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	QMA-Data dan Informasi Publik	001-Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi (65 Juta Ha)	1	Peta	1.051.523	3	Peta	3.360.523	3	Peta	3.360.523
5436-Pencegahan Dampak Lingkungan	05-Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	004-Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang	40	Dokumen	5.989.813	65	Dokumen	10.104.813	65	Dokumen	10.104.813

KEGIATAN	UKE II	KRO	RO	PEMANTAPAN RENJA 2023 (KLH dan KBPI)			REV RENJA-ABT PNBPKH 2023			RENJA 2023 (UPDATE)		
				TARGET	SATUAN	ALOKASI	TARGET	SATUAN	ALOKASI	TARGET	SATUAN	ALOKASI
	Kebijakan Wilayah dan Sektor		divalidasi									
5436-Pencegahan Dampak Lingkungan	06-Balai Pemantapan Kawasan Hutan	QMA-Data dan Informasi Publik	002-Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah BPKHTL	20	Dokumen	9.136.000	20	Dokumen	9.136.000	20	Dokumen	9.136.000
5436-Pencegahan Dampak Lingkungan	06-Balai Pemantapan Kawasan Hutan	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	002-Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	22	Layanan	1.100.000	22	Layanan	1.100.000	22	Layanan	1.100.000
5436-Pencegahan Dampak Lingkungan	06-Balai Pemantapan Kawasan Hutan	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	003-Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	22	Layanan	1.100.000	22	Layanan	1.100.000	22	Layanan	1.100.000
5436-Pencegahan Dampak Lingkungan	07-Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	007-Sistem kajian dampak lingkungan	40	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	1.301.850	81	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	30.716.850	81	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	30.716.850
5436-Pencegahan Dampak Lingkungan	07-Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	UAB-Sistem Informasi Pemerintahan	001-Sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikembangkan	1	Sistem Informasi	3.392.235	1	Sistem Informasi	10.151.235	1	Sistem Informasi	10.151.235

KEGIATAN	UKE II	KRO	RO	PEMANTAPAN RENJA 2023 (KLH dan KBPI)			REV RENJA-ABT PNBPKH 2023			RENJA 2023 (UPDATE)		
				TARGET	SATUAN	ALOKASI	TARGET	SATUAN	ALOKASI	TARGET	SATUAN	ALOKASI
5436-Pencegahan Dampak Lingkungan	07-Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	170	Layanan	1.219.350	271	Layanan	2.781.125	271	Layanan	2.781.125
5436-Pencegahan Dampak Lingkungan	07-Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	QMA-Data dan Informasi Publik	003-Dokumen hasil identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan indeks jasa lingkungan tinggi	1	Dokumen	385.000	1	Dokumen	385.000	1	Dokumen	385.000
5433-Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	02-Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	30	Layanan	392.000	30	Layanan	392.000	30	Layanan	392.000
5433-Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	02-Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	001-Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	1	Layanan	500.000	1	Layanan	500.000	1	Layanan	500.000
5433-Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	02-Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	003-SK Penetapan Kawasan Hutan	22	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	10.764.901	29	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	15.943.799	29	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	15.943.799
5433-Pengukuhan dan Penatagunaan	02-Direktorat Pengukuhan dan	PBV-Kebijakan Bidang	004-SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	4	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	1.600.000	24	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	9.200.000	24	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	9.628.000

KEGIATAN	UKE II	KRO	RO	PEMANTAPAN RENJA 2023 (KLH dan KBPI)			REV RENJA-ABT PNBPKH 2023			RENJA 2023 (UPDATE)		
				TARGET	SATUAN	ALOKASI	TARGET	SATUAN	ALOKASI	TARGET	SATUAN	ALOKASI
Kawasan Hutan	Penatagunaan Kawasan Hutan	Kehutanan			jian			ajian				
5433- Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	02-Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	PBV- Kebijakan Bidang Kehutanan	005-Luas Kawasan Hutan yang dilepaskan Untuk IKN	1	Layanan	1.000.000	2	Layanan	3.000.000	2	Layanan	2.572.000
5433- Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	06-Balai Pemantapan Kawasan Hutan	PBV- Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	4	Rekomendasi Kebijakan	7.546.080	24	Rekomendasi Kebijakan	55.154.292	24	Rekomendasi Kebijakan	56.698.943
5433- Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	06-Balai Pemantapan Kawasan Hutan	PBV- Kebijakan Bidang Kehutanan	002-Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	22	Rekomendasi Kebijakan	295.486.444	29	Rekomendasi Kebijakan	469.891.418	29	Rekomendasi Kebijakan	339.650.704
5434-Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	03-Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	001-Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	1	layanan	950.000	1	layanan	950.000	1	layanan	950.000
5434-Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	03-Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	004-Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	1	layanan	1.500.000	1	layanan	2.350.000	1	layanan	2.350.000
5434-Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	03-Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	005-Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha,	2	layanan	375.000	2	layanan	375.000	2	layanan	375.000

KEGIATAN	UKE II	KRO	RO	PEMANTAPAN RENJA 2023 (KLH dan KBPI)			REV RENJA-ABT PNBPKH 2023			RENJA 2023 (UPDATE)		
				TARGET	SATUAN	ALOKASI	TARGET	SATUAN	ALOKASI	TARGET	SATUAN	ALOKASI
			Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut									
5434-Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	03-Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	006-Data dan informasi deforestasi	1	layanan	125.000	1	layanan	1.056.500	1	layanan	1.056.500
5434-Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	03-Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	007-Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	2	layanan	250.000	2	layanan	250.000	2	layanan	250.000
5434-Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	06-Balai Pemantapan Kawasan Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	002-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	44	layanan	2.961.008	70	layanan	4.781.008	70	layanan	4.781.412
5434-Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	06-Balai Pemantapan Kawasan Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	003-Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	22	layanan	2.311.425	22	layanan	2.311.425	22	layanan	2.311.425
6744-Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan	04-Direktorat Rencana, Penggunaan dan	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	002-Penyusunan Rencana kehutanan	3	Rekomendasi Kebijakan	544.000	8	Rekomendasi Kebijakan	2.823.011	8	Rekomendasi Kebijakan	2.823.011



KEGIATAN	UKE II	KRO	RO	PEMANTAPAN RENJA 2023 (KLH dan KBPI)			REV RENJA-ABT PNBPKH 2023			RENJA 2023 (UPDATE)		
				TARGET	SATUAN	ALOKASI	TARGET	SATUAN	ALOKASI	TARGET	SATUAN	ALOKASI
Wilayah Pengelolaan Hutan	Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan											
6744-Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	04-Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	003-Penetapan/perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS KHDTK KHKP KHDPK)	1	Rekomendasi Kebijakan	150.000	4	Rekomendasi Kebijakan	2.133.000	4	Rekomendasi Kebijakan	2.133.000
6744-Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	04-Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBPKH Penggunaan Kawasan Hutan	300	layanan	1.888.575	300	layanan	4.954.576	300	layanan	5.351.576
6744-Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	04-Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	002-Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/Kab/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan	30	layanan	200.000	30	layanan	2.200.000	30	layanan	2.004.857
6744-Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	04-Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	003-Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	3	layanan	270.000	3	layanan	699.000	3	layanan	638.446

KEGIATAN	UKE II	KRO	RO	PEMANTAPAN RENJA 2023 (KLH dan KBPI)			REV RENJA-ABT PNBPKH 2023			RENJA 2023 (UPDATE)		
				TARGET	SATUAN	ALOKASI	TARGET	SATUAN	ALOKASI	TARGET	SATUAN	ALOKASI
	Hutan											
6744-Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	04-Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	004-Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala	12	layanan	498.000	12	layanan	1.889.750	12	layanan	1.748.447
6744-Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	04-Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	QMA-Data dan Informasi Publik	001-Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	1	layanan	310.000	1	layanan	3.036.400	1	layanan	3.036.400
6744-Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	04-Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	QMA-Data dan Informasi Publik	005-Data dan Areal Perhutanan Sosial	1	layanan	500.000	1	layanan	500.000	1	layanan	500.000
6744-Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	06-Balai Pemantapan Kawasan Hutan	BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	001-Hasil Verifikasi PNBPKH Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	100	Badan usaha	5.477.852	213	Badan usaha	10.793.872	213	Badan usaha	10.793.872

KEGIATAN	UKE II	KRO	RO	PEMANTAPAN RENJA 2023 (KLH dan KBPI)			REV RENJA-ABT PNPB PKH 2023			RENJA 2023 (UPDATE)		
				TARGET	SATUAN	ALOKASI	TARGET	SATUAN	ALOKASI	TARGET	SATUAN	ALOKASI
5432-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	01-Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	23	Layanan	33.344.400	23	Layanan	58.780.637	23	Layanan	58.526.660
5432-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	01-Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	23	Layanan	204.283.591	23	Layanan	204.283.591	23	Layanan	197.815.595
5432-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	01-Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal				2.625	Unit	53.468.201	3.072	Unit	54.946.664
5432-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	01-Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	971-Layanan Prasarana Internal	2	Unit	2.170.000	14	Unit	17.889.013	17	Unit	16.532.769

### Lampiran 5 Penyesuaian Target Penataan Batas Kawasan Hutan (Reguler) Tahun 2023

PROVINSI	DIPA 2023 (AWAL)		BLOKIR AUTOMATIC ADJUSMENT		ABT PNBP-PKH						TARGET PENATAAN BATAS KH (UPDATE)	
	LUAS (HA)	PANJANG TRAYEK (KM)	LUAS (HA)	PANJANG TRAYEK (KM)	PENGEMBALIAN BLOKIR		PERCEPATAN PENETAPAN KH		TOTAL		LUAS (HA)	PANJANG TRAYEK (KM)
					LUAS (HA)	PANJANG TRAYEK (KM)	LUAS (HA)	PANJANG TRAYEK (KM)	LUAS (HA)	PANJANG TRAYEK (KM)		
SUMATERA UTARA	725.402,90	2.674,37	298.739,84	1.101,38	298.739,84	1.101,38	733.784,00	3.268,80	1.032.523,84	4.370,18	1.459.186,90	5.943,17
SUMATERA BARAT	872.049,68	2.593,09	773.851,49	2.301,09	773.851,49	2.301,09			773.851,49	2.301,09	872.049,68	2.593,09
SUMATERA SELATAN			-	-	-	-	2.069,96	14,00	2.069,96	14,00	2.069,96	14,00
MALUKU UTARA	1.071.269,00	4.944,00	391.306,52	1.805,91	391.306,52	1.805,91			391.306,52	1.805,91	1.071.269,00	4.944,00
SULAWESI SELATAN	468.511,00	1.607,00	302.629,49	1.038,02	302.629,49	1.038,02			302.629,49	1.038,02	468.511,00	1.607,00
NTB	139,00	8,00	-	-	-	-	1.784,32	17,81	1.784,32	17,81	1.923,32	25,81
MALUKU	1.125.868,64	4.121,58	394.806,58	1.445,31	394.806,58	1.445,31			394.806,58	1.445,31	1.125.868,64	4.121,58
PAPUA	2.216.649,00	2.200,60	692.312,43	687,30	692.312,43	687,30			692.312,43	687,30	2.216.649,00	2.200,60
BANTEN	47.087,00	4,00	-	-	-	-			-	-	47.087,00	4,00
DKI JAKARTA	115,00	9,00	-	-	-	-			-	-	115,00	9,00
JAWA BARAT	981,00	50,00	146,86	7,49	146,86	7,49			146,86	7,49	981,00	50,00
YOGYAKARTA	406,00	169,00	-	-	-	-			-	-	406,00	169,00
KEP. RIAU	130.605,50	1.866,26	68.637,48	980,78	68.637,48	980,78			68.637,48	980,78	130.605,50	1.866,26
KEP. BANGKA BELITUNG	42.363,01	17,38	-	-	-	-			-	-	42.363,01	17,38
JAMBI	36.264,00	11,40	-	-	-	-			-	-	36.264,00	11,40
NTT			-	-	-	-	697.268,00	1.139,00	697.268,00	1.139,00	697.268,00	1.139,00
PAPUA BARAT	667.193,00	3.799,00	193.382,24	684,72	193.382,24	684,72			193.382,24	684,72	667.193,00	3.799,00
ACEH	2.415.752,00	2.659,00	1.094.134,26	1.204,31	1.094.134,26	1.204,31			1.094.134,26	1.204,31	2.415.752,00	2.659,00
RIAU	1.141.915,00	9.275,59	448.172,23	3.640,43	448.172,23	3.640,43			448.172,23	3.640,43	1.141.915,00	9.275,59
LAMPUNG	49.441,00	386,00	-	-	-	-			-	-	49.441,00	386,00
BENGKULU	102.434,00	341,00	-	-	-	-			-	-	102.434,00	341,00
KALIMANTAN TENGAH	3.755.150,61	3.604,00	1.339.019,57	1.285,12	1.339.019,57	1.285,12			1.339.019,57	1.285,12	3.755.150,61	3.604,00
SULAWESI TENGGARA	108.558,00	194,00	-	-	-	-			-	-	108.558,00	194,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.978.154,34</b>	<b>40.534,27</b>	<b>5.997.138,98</b>	<b>16.181,86</b>	<b>5.997.138,98</b>	<b>16.181,86</b>	<b>1.434.906,28</b>	<b>4.439,61</b>	<b>7.432.045,26</b>	<b>20.621,47</b>	<b>16.413.060,62</b>	<b>44.973,88</b>

**Lampiran 6 Penyesuaian Target Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan**

PROVINSI	DIPA 2023		ABT PNBP-PKH			TARGET TORA (UPDATE)		
	PENATAAN BATAS KAWASAN HUTAN UNTUK PENYELESAIAN TORA		PENATAAN BATAS KAWASAN HUTAN UNTUK PENYELESAIAN TORA		INVENTARISASI DAN VERIFIKASI OBYEK TORA DALAM KAWASAN HUTAN	PENATAAN BATAS KAWASAN HUTAN UNTUK PENYELESAIAN TORA		INVENTARISASI DAN VERIFIKASI OBYEK TORA DALAM KAWASAN HUTAN
	LUAS (HA)	PANJANG TRAYEK (KM)	LUAS (HA)	PANJANG TRAYEK (KM)	LUAS (HA)	LUAS (HA)	PANJANG TRAYEK (KM)	LUAS (HA)
SUMATERA UTARA	-	-			11.675,54			11.675,54
KALIMANTAN BARAT	-	-			42.440,00			42.440,00
KALIMANTAN TIMUR	524,00	55,00	524,30	22,57	15.170,67	1.048,30	77,57	15.170,67
KALIMANTAN SELATAN	-	-			42.586,00	-	-	42.586,00
SULAWESI SELATAN	2.500,00	150,00			5.237,76	2.500,00	150,00	5.237,76
NTB	-	-			7.699,31	-	-	7.699,31
JAWA TIMUR	-	-	710,00	321,00		710,00	321,00	-
JAMBI	-	-			11.055,52	-	-	11.055,52
PAPUA BARAT	-	-	1.220,00	142,00		1.220,00	142,00	-
ACEH	5.450,85	331,00				5.450,85	331,00	-
RIAU	1.633,08	563,00				1.633,08	563,00	-
LAMPUNG	-	-	23,00	8,00		23,00	8,00	-
BENGKULU	-	-			132,27	-	-	132,27
KALIMANTAN TENGAH	-	-	8.650,00	256,00		8.650,00	256,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>10.108</b>	<b>1.099</b>	<b>11.127</b>	<b>750</b>	<b>135.997</b>	<b>21.235</b>	<b>1.849</b>	<b>135.997</b>

**Lampiran 7 Penyesuaian Target Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan SDH di wilayah BPKHTL**

PROVINSI	INVENTARISASI HUTAN NASIONAL (KLASTER)	
	SEMULA	MENJADI
SUMATERA UTARA	2	2
SUMATERA SELATAN	5	5
KALIMANTAN BARAT	5	7
KALIMANTAN TIMUR	-	1
KALIMANTAN UTARA	1	1
KALIMANTAN SELATAN	4	5
SULAWESI UTARA	-	1
SULAWESI SELATAN	-	1
BALI	1	1
NTB	2	3
MALUKU	-	1
PAPUA	-	1
BANTEN	2	-
JAWA TIMUR	1	-
YOGYAKARTA	-	4
KEP. RIAU	1	2
KEP. BANGKA BELITUNG	2	6
JAMBI	2	-
NTT	2	3
GORONTALO	4	6
SULAWESI TENGAH	4	6
PAPUA BARAT	-	1
ACEH	-	1
RIAU	-	1
LAMPUNG	2	4
BENGKULU	2	2
KALIMANTAN TENGAH	-	1
SULAWESI TENGGARA	2	4
<b>TOTAL</b>	<b>44</b>	<b>70</b>

**Lampiran 8 Penyesuaian Target Kegiatan Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan di wilayah UPT BPKHTL**

PROVINSI	VERIFIKASI PNBP PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH KERJA BPKHTL (BADAN USAHA)	
	SEMULA	MENJADI
SUMATERA UTARA		1
SUMATERA BARAT	2	2
SUMATERA SELATAN	3	6
KALIMANTAN BARAT	1	2
KALIMANTAN TIMUR	24	47
KALIMANTAN UTARA	7	7
KALIMANTAN SELATAN	9	23
SULAWESI UTARA		12
MALUKU UTARA	6	6
SULAWESI SELATAN	2	17
BALI		1
NTB	1	1
MALUKU	1	1
PAPUA	1	1
KEP. RIAU		1
KEP. BANGKA BELITUNG	1	3
GORONTALO	1	2
SULAWESI TENGAH	6	12
PAPUA BARAT	1	2
RIAU	4	8
LAMPUNG	2	2
KALIMANTAN TENGAH	12	24
SULAWESI TENGGARA	16	32
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>213</b>

**Lampiran 9 Rincian Lokus Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Dampak Lingkungan di wilayah UPT BPKHTL**

PROVINSI	002 - Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah BPKH
	(Layanan)
KALIMANTAN BARAT	1
KALIMANTAN TIMUR	1
KALIMANTAN UTARA	1
KALIMANTAN SELATAN	1
BALI	1
NTB	1
BANTEN	1
DKI JAKARTA	1
JAWA BARAT	1
JAWA TENGAH	1
JAWA TIMUR	1
YOGYAKARTA	1
KEP. RIAU	1
KEP. BANGKA BELITUNG	1
JAMBI	1
NTT	1
SULAWESI TENGAH	1
PAPUA BARAT	1
RIAU	1
BENGKULU	1
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>



